



**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH (LPPD) KOTA LANGSA  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
2013**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2012 untuk disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah Otonom untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Langsa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan serta tugas-tugas lainnya. Media Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Langsa, disajikan dalam uraian Gambaran Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Langsa pada pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai dinamika, akan tetapi dengan

segenap dukungan serta cita-cita pemerintah daerah Kota Langsa untuk terus membangun Kota Langsa, tantangan dan hambatan yang terjadi dapat di atasi

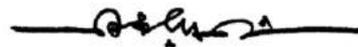
Demikian laporan ini disajikan dan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekaligus bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2012, harapan kami semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Langsa.

Akhirnya diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2012 ini dapat bermanfaat sebagai upaya mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Langsa, Maret 2013**

**Walikota Langsa,**



**Tgk. USMAN ABDULLAH, SE**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
A. Dasar Hukum	.....	1
B. Gambaran Umum Daerah	.....	3
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LANGSA</b>	.....	<b>15</b>
A. Visi dan Misi	.....	15
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	.....	18
C. Prioritas Pembangunan Daerah	.....	27
<b>BAB III URUSAN DESENTRALISASI</b>	.....	<b>34</b>
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	.....	34
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan	.....	43
1. Bidang Pendidikan	.....	43
2. Bidang Kesehatan	.....	52
3. Bidang Pekerjaan Umum	.....	63
4. Bidang Perumahan	.....	69
5. Bidang Perencanaan Pembangunan	.....	75
6. Bidang Perhubungan	.....	83
7. Bidang Lingkungan Hidup	.....	88
8. Bidang Pertanahan	.....	94
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	.....	99
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	.....	104
11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	.....	110

12. Bidang Sosial	115
13. Bidang Ketenagakerjaan	122
14. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	127
15. Bidang Penanaman Modal	132
16. Bidang Kebudayaan	137
17. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	142
18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	148
19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	156
20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	180
21. Bidang Komunikasi dan Informatika	187
22. Bidang Perpustakaan	193
23. Bidang Penataan Ruang	198
24. Bidang Ketahanan Pangan	203
25. Bidang Statistik	208
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	213
1. Bidang Pertanian	213
2. Bidang Pariwisata	218
3. Bidang Kelautan dan Perikanan	223
4. Bidang Industri	229
5. Bidang Perdagangan	234
6. Bidang Kehutanan	239
<b>BAB IV TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>244</b>
A. Tugas Pembantuan yang Diterima	244
<b>BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>247</b>
A. Kerjasama Antar Daerah	247
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	248
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal	250

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	.....	252
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	....	253

**BAB VI PENUTUP** ..... **255**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I Jumlah Pegawai Dilingkungan Pemko Langsa	.....	256
2. Lampiran II. 1 Tataran Pengambilan Kebijakan Dalam rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2012	.....	257
3. Lampiran II. 2 Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2012	.....	263
- Dinas Pendidikan	.....	263
- Dinas Kesehatan	.....	266
- Rumah Sakit Umum Daerah	.....	269
- Dinas Pekerjaan Umum	.....	273
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.....	276
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	.....	279
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	.....	270
- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	.....	275
- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	.....	279
- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	.....	283
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk	.....	288
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	.....	298
- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	.....	394
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	.....	323
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	.....	327
- Sekretariat Daerah	.....	332
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	.....	347
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPKA)	.....	351
- Inspektorat	.....	358

- Dinas Syariat Islam	.....	362
- Sekretariat KIP	.....	366
- Kecamatan Langsa Kota	.....	370
- Kecamatan Langsa Barat	.....	374
- Kecamatan Langsa Timur	.....	378
- Kecamatan Langsa Lama	.....	382
- Kecamatan Langsa Baro	.....	386
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)	.....	390
- Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	.....	390
- Badan Pemberdayaan Masyarakat	.....	401
- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	.....	405
- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian	.....	410
4. Lampiran II.3 Tataran Pelaksana Kebijakan	.....	420
5. Lampiran III. Daftar Qanun 2011	.....	430

ooo000000ooo

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai media evaluasi hasil – hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Ruang lingkup pelaporan dimaksud secara garis besar mencakup pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, serta kinerja yang telah dicapai terkait penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan adanya Laporan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang sedang berjalan di Kota Langsa, dan sekaligus dapat menjadi salah satu indikator dalam rangka penilaian kebutuhan perencanaan pembangunan diwilayah Kota Langsa.

#### **A. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2012, berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dinas Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun 2007-2012;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pembidangan Daerah Kota Langsa;
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012.

## **B. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis**

Kota Langsa terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang sebelumnya berstatus kota administratif menjadi Pemerintah Kota. Kota Langsa terletak di sebelah Timur Provinsi Aceh, yang berposisiikan sebelah Utara Pulau Sumatera, yaitu pada 04°24'35,68"-04°33'47,03" Lintang Utara dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah 262,41 Km<sup>2</sup>.

Wilayah Kota Langsa terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dan 66 Gampong dengan cukupannya masing-masing sebagai berikut :

1. Kecamatan Langsa Barat meliputi 13 (tiga belas) Desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 59,95 Km<sup>2</sup>.
2. Kecamatan Langsa Barö meliputi 12 (dua belas) Desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 77,5 Km<sup>2</sup>.
3. Kecamatan Langsa Kota meliputi 10 (sepuluh) Desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 7,53 Km<sup>2</sup>.
4. Kecamatan Langsa Lama meliputi 15 (lima belas) Desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 42,39 Km<sup>2</sup>.
5. Kecamatan Langsa Timur meliputi 16 (enam belas) Desa dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 75,04 Km<sup>2</sup>.

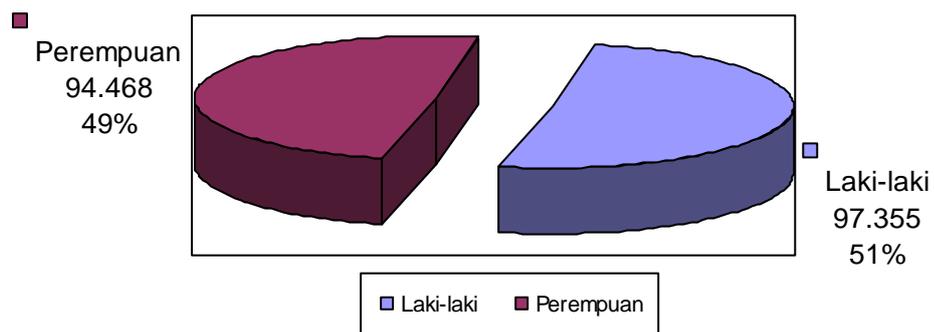
Lebih lanjut, jumlah bangunan rumah dalam wilayah Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 30.198 unit, Luas wilayah yang ber HPL/HGB didalam wilayah Kota Langsa adalah seluas 7.256 Ha, sementara itu Luas Kawasan kumuh adalah sebesar 3.936 Ha.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk di Kota Langsa hingga akhir tahun 2012 adalah sebesar 191.823, dengan sebaran penduduk terbesar di Kecamatan Langsa Barö yaitu sebanyak 53.504 jiwa, kemudian masing-masing diikuti oleh Kecamatan Langsa Kota sebanyak 47.771 jiwa, Kecamatan Langsa Barat sebanyak 40.836 jiwa, Kecamatan Langsa Lama sebanyak 34.068 jiwa dan Kecamatan Langsa Timur sebanyak 15.664 jiwa.

Komposisi Penduduk Kota Langsa berdasarkan jenis kelamin yaitu Penduduk Laki-laki sebanyak 97.365 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 94.468 jiwa, sementara itu, Penduduk Kota Langsa pada Tahun 2012 didominasi oleh kelompok umur antara 25-29 tahun yaitu sebanyak 20.076 jiwa dengan komposisi berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 9.861 jiwa dan perempuan sebanyak 10.215 jiwa.

### KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012



**KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN  
PENDIDIKAN TAHUN 2012**

NO	PENDIDIKAN	KECAMATAN					Jumlah
		LANGSA TIMUR	LANGSA BARAT	LANGSA KOTA	LANGSA LAMA	LANGSA BARÖ	
1	Belum Sekolah	3,182	7,718	8,203	6,186	9,617	34,906
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1,930	4,363	4,497	3,304	5,364	19,458
3	Tamat SD/Sederajat	4,237	10,027	6,401	7,251	8,480	36,396
4	Tamat SLTP/Sederajat	2,576	6,159	7,563	5,611	7,738	29,647
5	Tamat SLTA/Sederajat	3,136	9,350	16,184	10,003	17,129	55,802
6	D-I / II	108	331	522	268	530	1,759
7	Akademi/D-III Sarjana Muda	123	637	1,208	397	1,100	3,465
8	D-IV / Strata - I	337	2,117	3,011	1,008	3,343	9,816
9	Strata - II	12	130	175	34	200	551
10	Strata - III	3	4	7	6	3	23
	<b>TOTAL</b>	<b>15,644</b>	<b>40,836</b>	<b>47,771</b>	<b>34,068</b>	<b>53,504</b>	<b>191,823</b>

**PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR  
TAHUN 2012**

UMUR	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
0-4	7.667	7.138	
5-9	9.203	8.553	
10-14	9.163	8.746	
15-19	8.410	7.987	
20-24	8.791	8.750	
25-29	9.861	10.215	
30-34	9.622	9.169	
35-39	7.875	7.677	
40-44	7.216	6.996	
45-49	5.658	5.552	
50-59	5.051	4.469	
60-64	3.453	2.980	
65-69	2.172	2.018	
70-74	1.237	1.428	
> 75	1.976	2.790	
<b>J U M L A H</b>	<b>97.355</b>	<b>94.468</b>	
<b>T O T A L</b>	<b>191.823</b>		

**PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN KECAMATAN  
TAHUN 2012**

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
1. Langsa Barat	20.815	20.021	
2. Langsa Kota	24.227	23.544	
3. Langsa Timur	7.999	7.645	
4. Langsa Lama	17.217	16.851	
5. Langsa Barö	27.097	26.407	
<b>J U M L A H</b>	<b>97.355</b>	<b>94.468</b>	
<b>T O T A L</b>	<b>191.823</b>		

### 3. Kondisi Ekonomi

#### a. Potensi Unggulan Daerah

Ekonomi daerah Kota Langsa jika dilihat secara makro dari sudut pandang peranan PDRB menurut lapangan usaha, potensi unggulan Kota Langsa berada pada kelompok Sektor Tersier yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa lainnya, setidaknya produksi keempat kelompok sektor tersier tersebut memberikan kontribusi sebesar 60,00 persen dari total aktifitas produksi PDRB Kota Langsa.

Jika dilihat lebih mendalam, kelompok Sektor Tersier yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran yaitu sebesar 25,85%, kemudian masing-masing diikuti

oleh Sektor Jasa-jasa lainnya yaitu sebesar 15.90%, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Yaitu sebesar 9.95% serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar 9,30%.

Untuk lebih jelasnya,objek potensi unggulan daerah pada kelompok tersier yang dimaksud dapat di jabarkan sebagai berikut :

#### **a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran**

Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 25,85%, tertumpu pada Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar 24,79% dimana objek dari pada sub sektor tersebut adalah berupa kegiatan pengumpulan dan penjualan barang kepada para konsumen baik perorangan maupun rumah tangga yang kegiatan usaha tersebut terpusat di Kecamatan Langsa Kota.

Sub Sektor Hotel memberikan kontribusi sebesar 0,08%, dimana objek dari pada sektor tersebut berupa kegiatan yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Setidaknya tercatat sebanyak 15 (lima belas) tempat penginapan/perhotelan di Kota Langsa, yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :

**TEMPAT PENGINAPAN/PERHOTELAN DALAM  
WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012**

<b>No</b>	<b>NAMA HOTEL</b>	<b>KLASIFIKASI AKOMODASI</b>	<b>JUMLAH (KAMAR)</b>
1	2	3	4
1.	Hotel Kartika	Bintang 1	62
2.	Hotel Harmoni	-	89
3.	Hotel Training Kartini	-	12
4.	Hotel Firdaus	-	20
5.	Hotel Ridho	-	14
6.	Hotel Ferla Inn	-	32
7.	Hotel Rahmat Talita	-	15
8.	Losmen Haiva	-	11
9.	Losmen Diah	Melati 3	15
10.	Losmen Pase	Melati 1	20
11.	Losmen Pilar	-	19
12.	Losmen Delima	-	20
13.	Wisma Buana	-	8
14.	Wisma Nabila	-	10
15.	Wisma Mutiara	-	19

Sub Sektor Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,99%, dimana objek dari pada sektor tersebut berupa kegiatan yang mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya di konsumsi ditempat penjualan. Setidaknya tercatat sebanyak 28 (Dua Puluh Tiga) unit usaha rumah makan, 1 (satu) unit usaha restoran dan 22 (Enam belas) unit café/jambo.

## **a.2. Sektor Jasa-jasa lainnya**

Kontribusi Sektor Jasa-jasa Lainnya yaitu sebesar 15,90%, tertumpu pada Sub Sektor Pemerintahan Umum yaitu sebesar 14,76% dan Sub Sektor Swasta sebesar 1,14%, dimana objek dari kedua sub sektor tersebut adalah berupa kegiatan pelayanan Administrasi, Pemerintahan dan Pertanahan serta Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, jasa hiburan dan rekreasi.

## **a.3. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 9,95%, tertumpu pada Sub Sektor Pengangkutan yaitu sebesar 6,66%, dimana objek dari pada sektor tersebut berupa kegiatan jasa pelabuhan laut dan darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, agen penumpang, ekspedisi dan jasa penunjang lainnya (pengujian kelayakan angkutan).

Sub Sektor Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 3,29%, dimana objek dari pada sektor tersebut berupa kegiatan penunjang komunikasi (wartel, peger, warnet dan telepon seluler).

## **a.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar 9,30%, tertumpu pada Sub Sektor Bank yaitu sebesar 7,44%, dimana objek dari pada sub sektor tersebut adalah berupa kegiatan yang memberikan jasa transaksi keuangan dan lain-lain (capital).

Sub Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank memberikan kontribusi sebesar 0,31%,dimana objek dari pada sub sektor tersebut berupa segala macam bentuk asuransi.

Sub Sektor Real Estat memberikan kontribusi sebesar 1,53% dimana objek dari pada sub sektor tersebut berupa persewaan bangunan dan tanah baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan dan lain-lain.

Sub Sektor Jasa Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 0,03% dimana objek dari pada sub sektor tersebut berupa Jasa Hukum (Advokat/Pengacara, Notaris), Jasa Bangunan, Arsitek, Teknik, Jasa Periklanan dan Riset Pemasaran serta Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan.

Secara keseluruhan, potensi unggulan daerah Kota Langsa terutama pada kelompok sektor tersier tersebut dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya, hal ini berdasarkan pada perjalanan Kota Langsa selama 4 (empat) tahun (2008 s/d 2011) dimana pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**KOMPOSISI PDRB KELOMPOK SEKTOR  
TERSIER KOTA LANGSA TAHUN 2008 S/D 2011**

KOMPOSISI PDRB KELOMPOK SEKTOR TERSIER	TAHUN			
	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,51	26,09	25,76	25,85
2. Pengangkutan dan Komunikasi	9,09	9,29	9,86	9,95
3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,76	7,45	9,00	9,30
4. Jasa-jasa lainnya	16,87	16,29	15,73	15,90
<b>PDRB</b>	<b>58,23</b>	<b>59,12</b>	<b>60,35</b>	<b>61,00</b>

Selain itu, produksi dari kelompok Sektor Tersier tersebut diatas dapat menunjang kelompok Sektor lainnya baik dari segi Produksi maupun Komsumsi, seperti kelompok Sektor Primer (Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian) dan kelompok Sektor Sekunder (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan Air Minum dan Sektor Bangunan/Kontruksi) sehingga pada gilirannya akan meningkatkan demand terhadap kelompok-kelompok sektor tersebut.

**b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir (2009 s/d 2011), pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa atas dasar harga konstan adalah sebesar 4,64%, tahun 2010 sebesar 4,92% dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 4,98%.

Pada tahun 2011 Total PDRB Kota Langsa (atas dasar harga berlaku) yaitu sebesar Rp. 1.998.214,85,- juta, dengan komposisi terbesar disumbangkan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar Rp. 516.537,05,- juta, kemudian masing-masing diikuti oleh sektor Jasa sebesar Rp. 317.809,08,- juta, sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 300.795,17,- juta, Sektor Konstruksi sebesar Rp. 237.570,83,- juta, Sektor Pertanian sebesar Rp. 229.328,14,- juta, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp. 198.819,79,- juta, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan sebesar Rp. 185.830,28,- juta, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp. 8.656,04,- juta, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 2.868,47,- juta.

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA LANGSA  
TAHUN 2011**

NO	SEKTOR	ATAS DASAR		KET
		HARGA BERLAKU (JUTAAN RUPIAH)	HARGA KONSTAN (JUTAAN RUPIAH)	
1	2	3	4	5
1.	Pertanian	229.328,14	116.210,66	
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.868,47	1.587,40	
3.	Industri Pengolahan	300.795,17	186.020,51	
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.656,04	4.866,04	
5.	Konstruksi	237.570,26	83.369,89	
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	516.537,05	291.413,26	
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	198.819,79	68.746,20	
8.	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	185.830,28	35.258,91	
9.	Jasa-jasa	317.809,08	141.850,45	
<b>TOTAL PDRB</b>		1.998.214,85	929.323,82	

**PERTUMBUHAN (PDRB) KOTA LANGSA  
TAHUN 2009 S/D 2011**

NO	TAHUN	PDRB PERKAPITA		PERTUMBUHAN		KET
		HARGA BERLAKU (JUTAAN RUPIAH)	HARGA KONSTAN (JUTAAN RUPIAH)	HARGA BERLAKU (%)	HARGA KONSTAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009	1.640.923,02	849.067,27	14,83	4,64	
2.	2008	1.838.075,40	890.879,01	12,01	4,92	
3.	2011	1.998.214,85	929.323,80	8,71	4,32	

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LANGSA**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

RPJMD Kota Langsa merupakan dokumen yang disusun sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Langsa Definitif. Visi, Misi dan Program didalam RPJMD Kota Langsa tetap berpedoman kepada RPJPD Kota Langsa dan RPJMD Provinsi NAD. Dalam RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 disebutkan bahwa visi adalah gambaran ideal yang ingin di capai pada masa mendatang. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu idaman masa depan yang hendak dicapai. Idaman dimaksud tidak lain adalah suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, aman, damai dan bernuansa islami. Harapan masyarakat tersebut dijabarkan ke dalam suatu kalimat yang mengandung arti luas, yang dapat mewujudkan harapan/idaman masyarakat sebagai visi yang ingin di capai.

Sesuai amanah Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Visi dan Misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada Kota Langsa tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar Visi dan Misi pembangunan Kota Langsa Periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota Langsa menetapkan Visi Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

***" Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami "***

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat Visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut :

***Kota Berperadaban*** bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sementara itu, ***Kota yang islami*** memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama.

Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan antaranya adalah :

- 1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan, termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional;
- 3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan
- 4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta).

## **2. Misi**

Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar Visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisasi menjadi kenyataan dalam lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilu Kota Langsa tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi, berkompeten, efisien, dan profesional.
2. Melakukan penataan tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah serta nyaman.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat terutama yang berbasis pembinaan keterampilan dalam bekerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa.
5. Memfasilitasi percepatan penegrian Unsam Langsa dan peningkatan status STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi IAIN.
6. Memfasilitasi penguatan peningkatan pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.
9. Mendorong peningkatan UKM serta membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
10. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, tanggul, listrik, air bersih, transportasi, ICT, internet dan perbaikan pemukiman rakyat yang layak huni serta penataan lingkungan hidup yang serasi dan lestari.
11. Melakukan pelimpahan kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
12. Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub sektornya;

13. Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan berbentuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan;

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Untuk mewujudkan Visi Kota Langsa yakni "Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Islami", maka ditempuh Strategi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

### **1. Bidang Agama dan Syariat Islam, antara lain :**

- a. Meningkatkan dan mempekuat hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia;
- b. Membina kehidupan yang harmonis dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat;
- c. Mempererat hubungan silaturahmi dan kerukunan melalui inplementasi ajaran Islam secara kaffah;
- d. Pembinaan akhlak dan moral masyarakat melalui penyuluhan dan penerangan, ceramah-ceramah agama, diskusi kelompok pengajian dan menjelis taklim, serta pelibatan remaja mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar Islam;
- e. Memberantas praktek-praktek maksiat, perjudian dan minuman keras, melalui pendekatan agamis dan dialogis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga Kota Langsa seperti ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok pengajian, mahasiswa/pelajar dan LSM disamping dukungan dari aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya;
- f. Membudayakan busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari;
- g. Mengaktifkan shalat berjama'ah secara rutin dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quranulkarim secara benar dan baik; dan

- h. Terbinanya kerukunan antar ummat beragama dan saling menghormati satu sama lain.

**2. Bidang Ekonomi,** antara lain :

- a. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan dan perumahan);
- b. Menjamin distribusi barang dan jasa yang aman dan lancar;
- c. Menjamin kestabilan harga-harga terutama harga komoditi utama (beras, tepung, minyak tanah dan sebagainya);
- d. Memperluas kesempatan kerja terutama bagi keluarga miskin dan pengangguran;
- e. Mengefektifkan pemanfaatan potensi pajak dan retribusi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui analisis dan perhitungan potensi PAD;
- f. Meningkatkan produktivitas (nilai tambah) sektor-sektor ekonomi (pertanian/perikanan, industri dan jasa) melalui penyediaan sarana produksi, pendidikan dan latihan bagi para petani, nelayan, pengrajin dan lainnya;
- g. Menciptakan iklim investasi yang progresif dan kondusif (layak) melalui kemudahan prosedural lewat pelayanan satu atap (one roof service) terutama untuk pengembangan industri;
- h. Menumbuhkembangkan minat investor lokal untuk berwirausaha melalui pemberian kredit lunak untuk usaha kecil menengah serta koperasi dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat;
- i. Menciptakan kualitas produksi yang berstandarisasi (SII,ISO dan sebagainya) serta penciptaan kesan produk (brand image) yang positif;
- j. Membina UKM dan koperasi yang berdaya guna dan bernilai guna tinggi; dan
- k. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang optimal di semua sektor ekonomi untuk kepentingan ekonomi rakyat.

### **3. Bidang Sosial Budaya,** antara lain :

- a. Meningkatkan Kejar Paket A, dan bimbingan belajar non formal lainnya dengan pelaksanaan pendidikan murah, maju dan berkualitas;
- b. Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (siswa drop out nol persen) dengan pemberian bantuan paket belajar dan lainnya;
- c. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang;
- d. Menyempurkan kurikulum pada semua jenjang pendidikan umum dan pendidikan agama dengan memberikan muatan lokal yang bernuansa islami;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi (internet, LAN, teknik produksi dan sebagainya) terutama yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing melalui pemberian diklat dan lainnya (terutama untuk guru dan pegawai administrasi serta pelaku ekonomi);
- f. Mendukung dan menempatkan sepenuhnya para pemikir (innovator) yang dapat menambah kemajuan pendidikan dan keterampilan masyarakat dengan memberikan wadah dan sarana lainnya;
- g. Meningkatkan peran guru dan dosen dalam membina siswa dan mahasiswa dengan menanbah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi (terutama fasilitas laboratorium bahasa, komputer, internet, biologi, kimia, kebidanan, penambahan/rehabilitasi gedung, buku bacaan, dan sebagainya), serta melanjutkan pendidikan dosen ke strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
- h. Memberikan inentif bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat lainnya yang berprestasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia;
- i. Menjalin kerjasama antara dunia pendidikan (terutama sekolah kejuruan) dengan dunia kerja melalui sistem magang dan lainnya baik di dalam maupundi luar negeri (seperti Malaysia, Singapore, dan lainnya);

- j. Memajukan pendidikan olahraga melalui pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekolah/akademi/ perguruan tinggi serta pemberian insentif, sehingga melahirkan atlet-atlet handal yang dapat berkiprah di tingkat provinsi dan nasional, bahkan internasional;
- k. Memahami Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di kalangan siswa lanjutan pertama dan menengah melalui penyuluhan dan diklat dari rumah tangga (orang tua), lingkungan (desa), sekolah (guru bimbingan), dan tokoh-tokoh masyarakat;
- l. Menurunkan angka kematian balita (bawah lima tahun) khususnya bayi (infant mortality rate) melalui pemberian pengetahuan bagi si ibu dan keluarganya, pemberian imunisasi lengkap, serta menjaga kebersihan lingkungan setempat;
- m. Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan usia lanjut melalui pemberdayaan posyandu dengan pemberian paket-paket bantuan peningkatan gizi (makanan tambahan) dan lainnya;
- n. Mencegah dan memberantas penyakit menular terutama yang diakibatkan oleh nyamuk dan serangga lainnya dengan pemberian penyuluhan dan penyemprotan secara rutin serta pengadaan air bersih (PDAM) dan sanitasi lingkungan (jamban, selokan, rawa, dan sebagainya);
- o. Mencegah penyakit menular seksual (sifilis, gonorrhoeae, HIV/AIDS dan lainnya) melalui penyuluhan dan pemberdayaan ketahanan keluarga;
- p. Mensosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada penduduk, dan terpeliharanya keseimbangan kerja dan istirahat serta olahraga, sehingga angka harapan hidup tercapai lebih lama (angka kesakitan/morbiditas menurun)
- q. Meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dan tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pusku, polindes, posyandu) melalui pemberian dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (gedung, mobiler, dan lain-lain) serta pemberian tambahan insentif (financial dan non financial incentive) dan upaya-upaya lainnya (mendatangkan dokterrrrrrrsimal mungkin);

- r. Memberikan bantuan pengobatan gratis kepada keluarga miskin dan orang-orang terlantar, anak yatim, dan korban konflik, serta penyandang cacat melalui kerjasama dinas kesehatan dengan instansi terkait (BAZIS) dan golongan berpendapatan tinggi;
- s. Peningkatan rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan demi terciptanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui penyuluhan dan perlombaan;
- t. Menjaga ketahanan budaya lokal seiring dengan masuknya budaya asing melalui penggalakan acara-acara kebudayaan dan keagamaan;
- u. Peningkatan rasa kepedulian dari golongan pendapatan tinggi (high income group) terhadap golongan pendapatan rendah (kaum dhuafa, anak yatim, korban konflik, penyandang cacat, dan sebagainya) melalui pemberdayaan BAZIS, diklat, dan sebagainya;
- v. Pemenuhan alat-alat kontrasepsi untuk kalangan penduduk pra keluarga sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) melalui subsidi dan bantuan langsung; dan
- w. Memberikan perhatian khusus kepada peranan perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta dalam proses pembangunan sesuai dengan kodratnya, melalui pemberdayaan/membekali perempuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian.

**4. Bidang Infrastruktur, antara lain :**

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan pelabuhan (kuala langsa, dan TPI) serta drainase melalui peningkatan jumlah anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dalam anggaran pemerintahan daerah;
- b. Intensifikasi pembangunan kawasan industri khususnya di daerah pelabuhan kuala Langsa sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan yang handal melalui kerjasama dengan pihak ketiga (investor lokal, nasional, dan asing);

- c. Pembangunan kawasan kumuh (slamp area) menjadi kawasan teratur dan indah (asri) melalui kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan donatur;
- d. Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi serta teknologi informasi melalui kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD/BUMN dan investor lainnya; dan
- e. Peningkatan pembangunan sarana penunjang kegiatan ekonomi antar daerah (wilayah) seperti jalan tembus melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten lainnya (Aceh Timur).

**5. Bidang Pemerintahan Umum, Politik, dan Hukum, antara lain :**

- a. Menjaga keamanan penduduk dari sisi kebakaran melalui penambahan peralatan operasional pemadam kebakaran dan pendidikan bagi petugas pemadam kebakaran;
- b. Penegakan keamanan dan ketertiban umum yang telah diatur (UU, qanun, dan sebagainya) melalui pemberian sanksi yang tegas dan adil;
- c. Peningkatan disiplin warga terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara melalui penyuluhan dan proyek percontohan (pilot project) terutama perilaku berlalu lintas dan membuang sampah;
- d. Peningkatan pelayanan aparat pemerintah (PNS, POLRI, TNI) terhadap masyarakat melalui peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana serta insentif lainnya;
- e. Pembaharuan aturan (Perda/Qanun) dan keputusan kepala daerah yang telah usang, melalui konsolidasi internal antar instansi terkait;
- f. Penguatan sumber daya manusia di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang seimbang melalui pengadaan kuantitas dan kualitas SDM; dan
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perda/qanun yang berlaku serta tidak adanya back up dari oknum terhadap kegiatan yang melanggar peraturan daerah/qanun, kepatuhan masyarakat yang tinggi (terutama

pedagang kaki lima), anti narkoba dan lainnya melalui penyuluhan insentif dan penerapan sanksi tegas

Untuk melengkapi strategi di atas diperlukan beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

**a. Kesatuan dan Kerukunan Sosial**

Faktor ini diperluksn guna mewujudkan pandangan yang sama terhadap visi dan misi yang telah ditentukan. Dengan ini, diharapkan lahirnya sikap yang searah mulai dari aparatur pemerintahan (eksekutif), legislatif, alim ulama, tokoh masyarakat, sehingga apa yang telah dicanangkan dalam visi dan misi dapat terlaksana dengan bail.

**b. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk ini, salah satu cara yang ditempuh adalah membuat perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) lebih difokuskan kepada peningkatan pembangunan perekonomian secara merata. Dengan ini, diharapkan tumbuh kembangnya seluruh sektor ekonomi rakyat yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

**c. Penegakan Hukum**

Hukum merupakan norma yang mendidik warga negara untuk selalu berlaku sportif dan positif dalam setiap bidang kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum dipandang sebagai alat untuk membendung sifat dan perilaku negatif bagi semua pihak tanpa kecuali. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat dan adil sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah di segala bidang.

**d. Kemampuan Keuangan Daerah**

Upaya-upaya untuk meningkatkan Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perlu diupayakan peningkatan dana perimbangan dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi yang timbul dalam masyarakat.

**e. Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan**

Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan peran dan fungsi aparaturnya pengawasan, pengambilan tindakan atas setiap temuan pemeriksaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan wewenang penuh bagi badan pengawas untuk melakukan pengawasan.

**C. Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah dilakukan mengingat ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah sangat terbatas dan juga ditambah dengan krisis multidimensi yang terjadi sehingga perlu ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada rencana tindakan pemecahan permasalahan sebagai implementasi dan menjaga sinergitas kebijakan yang diterapkan oleh daerah. Adapun untuk lebih jelasnya, Prioritas dan Pembangunan Daerah Kota Langsa dapat dilihat pada berikut ini :

**1. Bidang Agama dan Syariat Islam, antara lain :**

- a. Pembinaan akhlak dan moral masyarakat melalui penyuluhan dan penerangan, ceramah-ceramah agama, diskusi kelompok pengajian dan majelis taklim, serta pelibatan remaja masjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar islam;
- b. Memberantas praktek-praktek maksiat, perjudian, dan minuman keras, melalui pendekatan agamis dan dialogis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga Kota Langsa seperti ulama, tokoh-tokoh masyarakat,

kelompok pemuda, kelompok pengajian, mahasiswa/pelajar, dan LSM, di samping dukungan dari aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya;

- c. Membudayakan busana muslim dan muslimat, dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Membina kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati satu sama lain.

## **2. Bidang Ekonomi, antara lain :**

- a. Menjamin distribusi barang dan jasa yang aman dan lancar;
- b. Mengefektifkan pemanfaatan potensi pajak dan retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui analisis dan perhitungan potensi PAD;
- c. Meningkatkan produktivitas (nilai tambah) sektor-sektor ekonomi (pertanian/perikanan, industri, dan jasa) melalui penyediaan sarana produksi, pendidikan dan latihan bagi para petani, nelayan, pengrajin, dan lainnya;
- d. Membina UKM dan koperasi yang berdaya guna dan bernilai guna tinggi; dan
- e. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang optimal di semua sektor ekonomi untuk kepentingan ekonomi rakyat

## **3. Bidang Sosial Budaya, antara lain :**

- a. Meningkatkan kejar paket A, dan bimbingan belajar non formal lainnya;
- b. Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (siswa drop out nol persen) dengan pemberian bantuan paket belajar dan lainnya;
- c. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang;
- d. Menyempurnakan kurikulum pada semua jenjang pendidikan umum dan pendidikan agama dengan memberikan muatan lokal yang bernuansa islami;

- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi (internet, LAN, teknik, produksi, dan sebagainya) terutama yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing melalui pemberian diklat dan lainnya (terutama untuk guru dan pegawai administrasi serta pelaku ekonomi);
- f. Mendukung dan menempatkan sepenuhnya para pemikir (innovator) yang dapat menambah kemajuan pendidikan dan keterampilan masyarakat dengan memberikan wadah dan sarana lainnya;
- g. Meningkatkan peran guru dan dosen dalam membina siswa dan mahasiswa dengan menanbah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi (terutama fasilitas laboratorium bahasa, komputer, internet, biologi, kimia, kebidanan, penambahan/rehabilitasi gedung, buku bacaan, dan sebagainya), serta melanjutkan pendidikan dosen ke strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
- h. Memberikan inentif bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat lainnya yang berprestasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia;
- i. Menjalin kerjasama antara dunia pendidikan (terutama sekolah kejuruan) dengan dunia kerja melalui sistem magang dan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri (seperti Malaysia, Singapore, dan lainnya);
- j. Memajukan pendidikan olahraga melalui pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekolah/akademi/perguruan tinggi serta pemberian insentif, sehingga melahirkan atlet-atlet handal yang dapat berkiprah di tingkat provinsi dan nasional, bahkan internasional;
- k. Memahami Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di kalangan siswa lanjutan pertama dan menengah melalui penyuluhan dan diklat dari rumah tangga (orang tua), lingkungan (desa), sekolah (guru bimbingan), dan tokoh-tokoh masyarakat;
- l. Menurunkan angka kematian balita (bawah lima tahun) khususnya bayi (infant mortality rate) melalui pemberian pengetahuan bagi si ibu dan

keluarganya, pemberian imunisasi lengkap, serta menjaga kebersihan lingkungan setempat;

- m. Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan usia lanjut melalui pemberdayaan posyandu dengan pemberian paket-paket bantuan peningkatan gizi (makanan tambahan) dan lainnya;
- n. Mencegah dan memberantas penyakit menular terutama yang diakibatkan oleh nyamuk dan serangga lainnya dengan pemberian penyuluhan dan penyemprotan secara rutin serta pengadaan air bersih (PDAM) dan sanitasi lingkungan (jamban, selokan, rawa, dan sebagainya);
- o. Mencegah penyakit menular seksual (sipilis, gonorrhoeae, HIV/AIDS dan lainnya) melalui penyuluhan dan pemberdayaan ketahanan keluarga;
- p. Mensosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada penduduk, dan terpeliharanya keseimbangan kerja dan istirahat serta olahraga, sehingga angka harapan hidup tercapai lebih lama (angka kesakitan/morbiditas menurun)
- q. Meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dan tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, posyandu) melalui pemberian dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (gedung, mobiler, dan lain-lain) serta pemberian tambahan insentif (financial dan non financial incentive) dan upaya-upaya lainnya (mendatangkan dokterrrrrrsimal mungkin);
- r. Memberikan bantuan pengobatan gratis kepada keluarga miskin dan orang-orang terlantar, anak yatim, dan korban konflik, serta penyandang cacat melalui kerjasama dinas kesehatan dengan instansi terkait (BAZIS) dan golongan berpendapatan tinggi;
- s. Peningkatan rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan demi terciptanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui penyuluhan dan perlombaan;
- t. Menjaga ketahanan budaya lokal seiring dengan masuknya budaya asing melalui penggalakan acara-acara kebudayaan dan keagamaan;
- u. Peningkatan rasa kepedulian dari golongan pendapatan tinggi (high income group) terhadap golongan pendapatan rendah (kaum dhuafa, anak yatim,

koraban konflik, penyandang cacat, dan sebagainya) melalui pemberdayaan BAZIS, diklat, dan sebagainya;

- v. Pemenuhan alat-alat kontrasepsi untuk kalangan penduduk pra keluarga sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) melalui subsidi dan bantuan langsung; dan
- w. Memberikan perhatian khusus kepada peranan perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta dalam proses pembangunan sesuai dengan kodratnya, melalui pemberdayaan/membekali perempuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian.

#### **4. Bidang Infrastruktur, antara lain :**

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan pelabuhan (kuala langsa, dan TPI) serta drainase melalui peningkatan jumlah anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dalam anggaran pemerintahan daerah;
- b. Intensifikasi pembangunan kawasan industri khususnya di daerah pelabuhan kuala Langsa sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan yang handal melalui kerjasama dengan pihak ketiga (investor lokal, nasional, dan asing);
- c. Pembangunan kawasan kumuh (slamp area) menjadi kawasan teratur dan indah (asri) melalui kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan donatur;
- d. Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi serta teknologi informasi melalui kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD/BUMN dan investor lainnya; dan
- e. Peningkatan pembangunan sarana penunjang kegiatan ekonomi antar daerah (wilayah) seperti jalan tembus melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten lainnya (Aceh Timur).

#### **5. Bidang Pemerintah Umum, Politik dan Hukum, antara lain :**

- a. Menjaga keamanan penduduk dari sisi kebakaran melalui penambahan peralatan operasional pemadam kebakaran dan pendidikan bagi petugas pemadam kebakaran;
- b. Penegakan keamanan dan ketertiban umum yang telah diatur (UU, qanun, dan sebagainya) melalui pemberian sanksi yang tegas dan adil;
- c. Peningkatan disiplin warga terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara melalui penyuluhan dan proyek percontohan (pilot project) terutama perilaku berlalu lintas dan membuang sampah;
- d. Peningkatan pelayanan aparat pemerintah (PNS, POLRI, TNI) terhadap masyarakat melalui peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana serta insentif lainnya;
- e. Pembaharuan aturan (Perda/Qanun) dan keputusan kepala daerah yang telah usang, melalui konsolidasi internal antar instansi terkait;
- f. Penguatan sumber daya manusia di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang seimbang melalui pengadaan kuantitas dan kualitas SDM; dan
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perda/qanun yang berlaku serta tidak adanya back up dari oknum terhadap kegiatan yang melanggar peraturan daerah/qanun, kepatuhan masyarakat yang tinggi (terutama pedagang kaki lima), anti narkoba dan lainnya melalui penyuluhan insentif dan penerapan sanksi tegas.

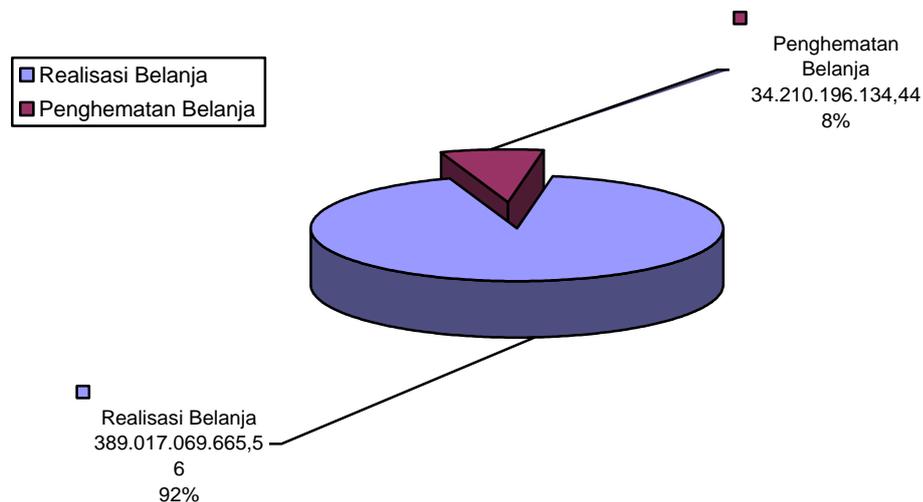
**BAB III**  
**URUSAN DESENTRALISASI**

**A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI**

**1. Anggaran, Realisasi Dan Pelaksana Urusan Wajib**

Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 389.017.069.665,56, atau sebesar 91,92% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 423.227.265.790,00

**POSISI BELANJA URUSAN WAJIB PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2012**



Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2012, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	<u>143.229.424.935,00</u> 143.229.424.935,00 0,00	<u>1.576.007.000,00</u> 1.469.207.000,00 106.800.000,00	<u>2.719.292.134,00</u> 2.687.592.134,00 31.700.000,00	<u>18.838.898.830,00</u> 18.827.398.830,00 11.500.000,00	<u>166.363.622.899,00</u> 166.213.622.899,00 150.000.000,00	<u>164.561.143.816,00</u> 164.412.685.506,00 148.458.310,00	<u>98,92</u> 98,92 98,97	1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah
2	Kesehatan	<u>47.217.461.935,00</u> 23.141.696.687,00 24.075.765.248,00	<u>24.826.174.834,00</u> 3.245.236.000,00 21.580.938.834,00	<u>3.951.390.139,00</u> 2.449.029.100,00 1.502.361.039,00	<u>3.550.129.270,00</u> 3.550.129.270,00 0,00	<u>79.545.156.178,00</u> 29.772.113.139,00 47.159.065.121,00	<u>53.486.488.267,00</u> 21.613.215.927,00 31.873.272.340,00	<u>67,24</u> 72,60 67,59	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Langsa
3	Pekerjaan Umum	4.002.333.076,00	271.417.000,00	714.800.000,00	16.019.504.000,00	21.008.054.076,00	20.274.001.490,00	96,51	1. Dinas Pekerjaan Umum
4	Perumahan	1.451.060.142,00	3.818.085.000,00	1.858.010.000,00	565.550.000,00	7.692.705.142,00	7.264.662.349,00	94,44	1. Badan Penggulangan Bencana Daerah
5	Perencanaan Pembangunan	<u>1.979.544.136,00</u> 1.979.544.136,00	<u>1.918.947.500,00</u> 1.647.165.500,00 271.782.000,00	<u>1.210.532.449,00</u> 1.072.462.500,00 138.069.949,00	<u>33.250.000,00</u> 33.250.000,00 0,00	<u>5.142.274.085,00</u> 4.732.422.136,00 409.851.949,00	<u>4.963.165.734,00</u> 4.680.011.134,00 283.154.600,00	<u>96,52</u> 98,89 69,09	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Sekretariat Daerah
6	Perhubungan	2.276.302.290,00	852.107.000,00	659.558.137,00	306.375.000,00	4.094.342.427,00	4.015.438.961,00	98,07	1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7	Lingkungan Hidup	1.543.034.078,00	5.793.308.000,00	5.322.503.500,00	2.517.266.000,00	15.176.111.578,00	14.981.555.820,00	98,72	1. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
8	Pertanahan		67.500.000,00	73.987.000,00	375.000.000,00	516.487.000,00	442.360.820,00	85,65	1. Sekretariat Daerah
9	Kependudukan dan Catatan Sipil	1.750.145.303,00	250.068.000,00	654.470.000,00	59.956.800,00	2.714.640.103,00	2.622.576.758,00	96,61	1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.130.544.834,00	402.910.000,00	679.944.890,00	688.000.000,00	3.901.399.724,00	3.824.154.960,00	98,02	1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

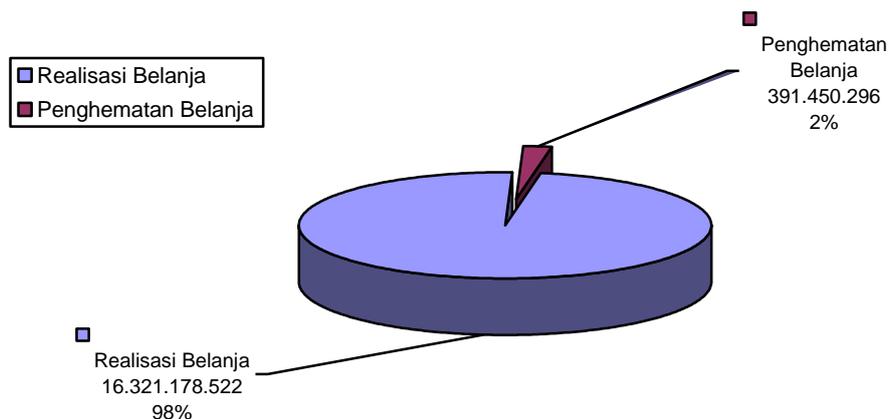
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		6.700.000,00	3.917.000,00	684.450.000,00	695.067.000,00	676.607.000,00	97,34	1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
12	Sosial	<u>2.564.747.103,00</u> 2.564.747.103,00	<u>554.503.420,00</u> 545.065.920,00	<u>1.529.259.631,00</u> 1.463.794.631,00	- 0,00	<u>4.648.510.154,00</u> 4.573.607.654,00	<u>4.523.848.776,00</u> 4.459.843.776,00	<u>97,32</u> 97,51	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
			9.437.500,00	65.465.000,00	0,00	74.902.500,00	64.005.000,00	85,45	2. Sekretariat Daerah
13	Ketenagakerjaan		81.493.920,00	0,00	0,00	81.493.920,00	81.493.920,00	100,00	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
14	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	2.650.000,00	32.430.000,00	0,00	35.080.000,00	35.066.000,00	99,96	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
15	Penanaman Modal		37.400.000,00	41.792.000,00	0,00	79.192.000,00	79.192.000,00	100,00	1. Sekretariat Daerah
16	Kebudayaan		<u>131.000.000,00</u> 3.800.000,00	<u>116.000.000,00</u> 8.200.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>247.000.000,00</u> 12.000.000,00	<u>246.168.774,00</u> 11.886.200,00	99,66 99,05	1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			127.200.000,00	107.800.000,00	0,00	235.000.000,00	234.282.574,00	99,69	2. Sekretariat Daerah
17	Kepemudaan dan Olah Raga	2.026.424.011,00	2.005.313.400,00	826.134.000,00	0,00	4.857.871.411,00	4.615.157.494,00	95,00	1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<u>2.642.916.391,00</u> 1.596.884.827,00	<u>5.528.812.500,00</u> 761.307.500,00	<u>857.718.341,00</u> 523.840.000,00	<u>27.192.500,00</u> 21.032.500,00	<u>9.056.639.732,00</u> 2.903.064.827,00	<u>8.963.762.963,00</u> 2.852.482.956,00	<u>98,97</u> 98,26	1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
		1.046.031.564,00	4.767.505.000,00	333.878.341,00	6.160.000,00	6.153.574.905,00	6.111.280.007,00	99,31	2. Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<u>38.426.208.354,00</u> 7.903.369.671,00 2.234.880.940,00 8.309.649.518,00	<u>27.817.479.686,00</u> 10.638.395.536,00 1.922.445.000,00 3.505.458.150,00	<u>22.319.436.771,00</u> 10.574.922.341,00 3.925.941.678,00 3.218.865.411,00	<u>3.559.481.630,00</u> 2.011.750.000,00 571.492.000,00 510.950.000,00	<u>92.122.606.441,00</u> 31.128.437.548,00 8.654.759.618,00 15.544.923.079,00	<u>88.208.798.588,56</u> 29.749.299.623,00 8.150.873.443,00 14.551.036.558,56	<u>95,75</u> 95,57 94,18 93,61	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRK 3. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.961.577.204,00	302.020.000,00	1.248.962.000,00	8.950.000,00	4.521.509.204,00	4.480.171.375,00	99,09	4. Inspektorat
		2.036.307.397,00	2.752.074.000,00	200.780.000,00	158.500.000,00	5.147.661.397,00	5.126.812.511,00	99,59	5. Dinas Syariat Islam
		729.060.474,00	103.360.000,00	159.735.585,00	0,00	992.156.059,00	944.031.982,00	95,15	6. Sekretariat KIP/KPU
		1.590.223.616,00	1.344.451.000,00	180.315.000,00	0,00	3.114.989.616,00	2.935.640.551,00	94,24	7. Kec. Langsa Kota
		1.280.060.154,00	1.437.757.000,00	173.867.722,00	0,00	2.891.684.876,00	2.761.936.613,00	95,51	8. Kec. Langsa Barat
		1.398.792.392,00	1.442.022.000,00	192.987.000,00	0,00	3.033.801.392,00	2.968.291.410,00	97,84	9. Kec. Langsa Timur
		1.200.496.648,00	1.529.802.000,00	203.437.950,00	7.439.630,00	2.941.176.228,00	2.910.856.707,00	98,97	10. Kec. Langsa Lama
		1.191.075.463,00	1.477.674.000,00	175.694.319,00	0,00	2.844.443.782,00	2.664.147.298,00	93,66	11. Kec. Langsa Baro
		731.388.289,00	319.982.000,00	322.896.715,00	125.800.000,00	1.500.067.004,00	1.439.200.830,00	95,94	12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
		6.859.326.588,00	1.042.039.000,00	1.741.031.050,00	164.600.000,00	9.806.996.638,00	9.526.499.687,00	97,14	13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
20	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	<u>1.339.848.831,00</u> 1.393.791.283,00	<u>1.132.685.000,00</u> 359.715.000,00	<u>609.592.926,00</u> 374.805.926,00	<u>32.050.000,00</u> 17.800.000,00	<u>3.153.869.209,00</u> 2.146.112.209,00	<u>3.103.150.673,00</u> 2.111.531.673,00	<u>98,39</u> 98,39	1. Badan Pemberdayaan Masyarakat
			772.970.000,00	234.787.000,00	-	1.007.757.000,00	991.619.000,00	98,40	2. Sekretariat Daerah
21	Komunikasi dan Informatika		<u>213.500.000,00</u> 0,00	<u>602.761.500,00</u> 57.130.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>816.261.500,00</u> 57.130.000,00	<u>810.946.800,00</u> 57.125.000,00	<u>99,35</u> 99,99	1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			213.500.000,00	545.631.500,00	0,00	759.131.500,00	753.821.800,00	99,30	2. Sekretariat Daerah
22	Perpustakaan dan Arsip	864.615.311,00	108.444.000,00	164.627.000,00	0,00	1.137.686.311,00	1.112.727.376,00	97,81	1. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
23	Penataan Ruang	0,00	32.000.000,00	65.305.400,00	0,00	97.305.400,00	97.305.400,00	100,00	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Ketahanan Pangan		168.750.000,00	24.312.000,00	0,00	193.062.000,00	175.750.000,00	91,03	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
25	Statistik	0,00	85.827.500,00	0,00	0,00	85.827.500,00	85.827.500,00	100,00	1. BAPPEDA
	<b>JUMLAH</b>	<b>253.444.610.730,00</b>	<b>77.555.883.760,00</b>	<b>44.929.974.818,00</b>	<b>47.257.104.030,00</b>	<b>423.227.265.790,00</b>	<b>389.017.069.665,56</b>	<b>91,92</b>	

## 2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan, pemerintah Kota Langsa didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 16.321.178.522,00 atau sebesar 97,66% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 16.712.628.818,00

### POSISI BELANJA URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012



Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2012, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**ANGGARAN, REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	URUSAN PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	SKPD PELAKSANA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pertanian	0,00	0,00	543.597.400,00	244.700.000,00	788.297.400,00	782.314.800,00	99,24	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
2.	Pariwisata	0,00	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.904.000,00	99,26	1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Kelautan, Perikanan	4.069.067.637,00	552.030.000,00	2.523.438.000,00	2.368.792.400,00	9.513.328.037,00	9.317.988.123,00	97,95	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
4.	Industri	2.577.642.352,00	1.437.792.000,00	776.441.088,00	53.048.853,00	4.844.924.293,00	4.767.927.462,00	98,41	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Perdagangan	0,00	206.870.000,00	58.021.088,00	0,00	264.891.088,00	253.338.155,00	95,64	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6.	Kehutanan	0,00	0,00	976.828.600,00	311.359.400,00	1.288.188.000,00	1.186.705.982,00	92,12	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
<b>JUMLAH</b>		<b>6.646.709.989,00</b>	<b>2.199.692.000,00</b>	<b>4.888.326.176,00</b>	<b>2.977.900.653,00</b>	<b>16.712.628.818,00</b>	<b>16.321.178.522,00</b>	<b>97,66</b>	

### **3. Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Langsa meliputi sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, RSUD dan Kecamatan, dengan Penjabaran sebagai berikut :

Sekretariat terdiri dari Sekretariat DPRK dan Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah meliputi 9 (Sembilan) Bagian dan dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah serta dibantu oleh 3 (Tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi tiga bagian, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Asisten pemerintahan membawahi 3 (Tiga) Bagian yaitu :
  - (1). Bagian Pemerintahan Umum
  - (2). Bagian Hukum
  - (3). Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Keistimewaan Aceh, pembangunan dan ekonomi membaahi 3 (Tiga) Bagian yaitu :
  - (1). Bagian Keistimewaan Aceh
  - (2). Bagian Administrasi Pembangunan
  - (3). Bagian Perekonomian
- c. Asisten Asisten Administrasi umum membawahi 3 (Tiga) Bagian yaitu :
  - (1). Bagian Umum
  - (2). Bagian Organisasi dan Kepegawaian
  - (3). Bagian Hubungan Masyarakat

❖ Penjabaran Badan meliputi sebagai berikut :

- 1) Badan Inspektorat
- 2) Badan perencanaan Pembangunan daerah

- 3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- 4) Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana
- 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
- 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

❖ Penjabaran dinas meliputi sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 6) Dinas sosial, tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk
- 7) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- 8) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)
- 9) Dinas Syariat Islam
- 10) Dinas kelautan, Perikanan dan Pertanian
- 11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

❖ 1 (satu) Unit RSUD

❖ Penjabaran Kantor meliputi sebagai berikut :

- 1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
- 3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)
- 4) Komisi Pemilihan Umum

❖ Penjabaran Kecamatan meliputi sebagai berikut :

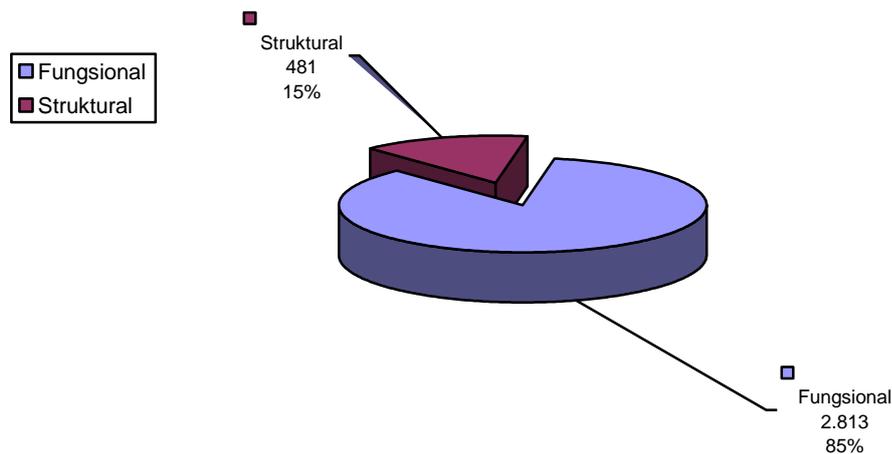
- 1) Kecamatan Langsa Kota
- 2) Kecamatan Langsa Barat
- 3) Kecamatan Langsa Timur

4) Kecamatan Langsa Lama

5) Kecamatan Langsa Baru

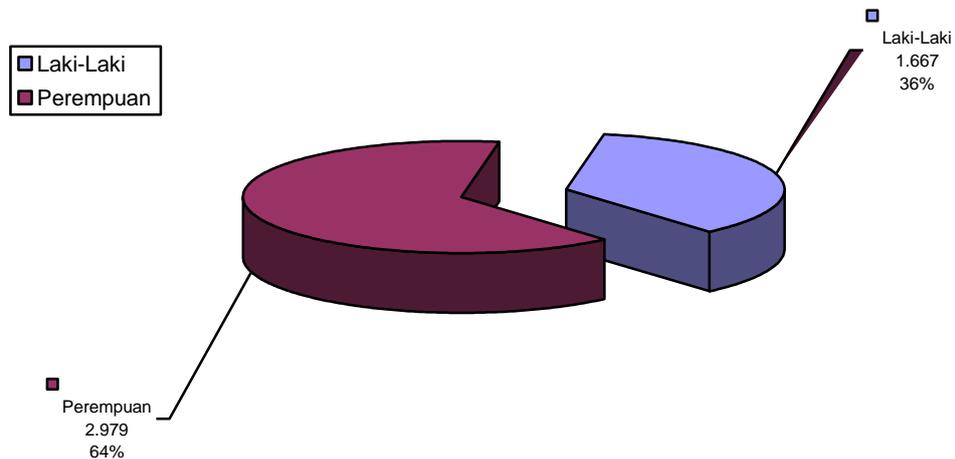
Lebih lanjut, jumlah personil PNS yang tersebar diseluruh SKPD Pemerintah Kota Langsa Sebanyak 4.646 Orang dengan klasifikasi tenaga Struktural sebanyak 481 Orang dan tenaga Fungsional sebanyak 2.813 Orang.

**KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSA  
BERDASARKAN TENAGA FUNGSIONAL DAN  
STRUKTURAL  
TAHUN ANGGARAN 2012**



Sementara itu, jumlah personil PNS Pemerintah Kota Langsa berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-laki sebanyak 1.667 Orang dan perempuan sebanyak 2.813 Orang.

**KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSA  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
TAHUN ANGGARAN 2012**



Penjabaran jumlah PNS pemerintah Kota Langsa secara lebih rinci dapat dilihat pada lembar Lampiran pelaporan ini.

**B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

**1. Bidang Pendidikan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 7 (Tujuh) Program dan 42 (empat puluh dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a.1. Dinas Pendidikan

- ❖ Pelaksanaan program sebanyak 6 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 41 unit

a.2. Sekretariat Daerah

- ❖ Pelaksanaan program sebanyak 1 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Pendidikan Usia Dini	32,70%
b.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	71,09%
c.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,65%
d.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	72,69%
e.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	59,60%
f.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13%
g.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,03%
h.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,19%
i.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,35%
j.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	87,36%
k.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	69,55%
l.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	67,39%
n.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	83,67,13%
o.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	71,16%

### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.166.261.671.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.561.143.816,00 Atau sebesar 98,98%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang pendidikan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 38,61%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang pendidikan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>				
	<b>A.1. DINAS PENDIDIKAN</b>				
	<b>A.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>143.229.424.935,00</b>	<b>142.097.725.886,00</b>	<b>-1.131.699.049,00</b>	<b>99,21</b>
	<b>A.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.184.293.009,00</b>	<b>2.025.557.593,00</b>	<b>-158.735.416,00</b>	<b>92,73</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	18.222.223,00	18.199.000,00	-23.223,00	99,87
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	431.666.667,00	336.241.536,00	-95.425.131,00	77,89
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	99.911.112,00	99.421.550,00	-489.562,00	99,51
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	133.888.889,00	127.397.086,00	-6.491.803,00	95,15
	5. Penyediaan alat tulis kantor	292.030.000,00	286.061.052,00	-5.968.948,00	97,96
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	203.222.223,00	196.708.282,00	-6.513.941,00	96,79
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	38.444.445,00	32.988.764,00	-5.455.681,00	85,81
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.488.560,00	116.751.000,00	-1.737.560,00	98,53
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.250.000,00	31.278.800,00	-3.971.200,00	88,73
	10. Penyediaan makanan dan minuman	78.333.334,00	75.132.075,00	-3.201.259,00	95,91
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	310.155.556,00	295.637.900,00	-14.517.656,00	95,32
	12. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	424.680.000,00	409.740.548,00	-14.939.452,00	96,48
	<b>A.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>597.107.550,00</b>	<b>581.394.199,00</b>	<b>-15.713.351,00</b>	<b>97,37</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	206.699.550,00	196.833.199,00	-9.866.351,00	95,23
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.900.000,00	83.997.000,00	-3.903.000,00	95,56
	3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	302.508.000,00	300.564.000,00	-1.944.000,00	99,36
	<b>A.1.4. Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>101.951.779,00</b>	<b>100671779,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>98,74</b>
	1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	64.000.000,00	64000000,00	0,00	100,00
	2. Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK	37951779	36671779	-1.280.000,00	96,63

1	2	3	4	5	6
	<b>A.1.5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>19.109.782.251,00</b>	<b>18.748.840.654,00</b>	<b>-360.941.597,00</b>	<b>98,11</b>
	1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.297.559.270,00	3.198.104.602,00	-99.454.668,00	96,98
	2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.220.072.000,00	1.202.290.072,00	-17.781.928,00	98,54
	3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	511.000.000,00	499.186.700,00	-11.813.300,00	97,69
	4. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	9.438.881.000,00	9.337.235.300,00	-101.645.700,00	98,92
	5. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	134.166.170,00	134.166.170,00	0,00	100,00
	6. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	135.425.667,00	135.425.667,00	0,00	100,00
	7. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	55.100.335,00	55.100.335,00	0,00	100,00
	8. Penyelenggaraan Paket A Setara SD	14.443.000,00	12.403.000,00	-2.040.000,00	85,88
	9. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	24.973.950,00	21.859.950,00	-3.114.000,00	87,53
	10. Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.746.710.000,00	3.624.446.999,00	-122.263.001,00	96,74
	11. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	49.107.004,00	49.087.004,00	-20.000,00	99,96
	12. Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.746.710.000,00	3.624.446.999,00	-122.263.001,00	96,74
	13. Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah	38.598.690,00	38.330.690,00	-268.000,00	99,31
	14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	443.745.165,00	441.204.165,00	-2.541.000,00	99,43
	<b>A.1.6. Program Pendidikan Menengah</b>	<b>890.462.035,00</b>	<b>758.994.055,00</b>	<b>-131.467.980,00</b>	<b>85,24</b>
	1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00
	2. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	75.000.000,00	69.440.000,00	-5.560.000,00	92,59
	3. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	44.915.300,00	-	-44.915.300,00	0,00
	4. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	49.950.462,00	47.838.462,00	-2.112.000,00	95,77
	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	248.081.368,00	236.912.688,00	-11.168.680,00	95,50
	6. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa	180.334.905,00	114.942.905,00	-65.392.000,00	63,74
	7. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	175.000.000,00	172.680.000,00	-2.320.000,00	98,67
	<b>A.1.7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>100.601.340,00</b>	<b>99.501.340,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>98,91</b>
	1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	20.439.117,00	20.439.117,00	0,00	100,00
	2. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	80.162.223,00	79.062.223,00	-1.100.000,00	98,63
<b>A.2.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				

1	2	3	4	5	6
	<b>A.2.1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b> 1. Pembinaan Dewan Pendidikan	150.000.000,00 150.000.000,00	148.458.310,00 148.458.310,00	-1.541.690,00 -1.541.690,00	98,97 98,97
	<b>JUMLAH</b>	<b>166.261.671.120,00</b>	<b>164.561.143.816,00</b>	<b>-1.700.527.304,00</b>	<b>98,98</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pendidikan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan ketersediaan laboratorium bidang studi pada setiap sekolah yang belum mencukupi.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
  
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA dan Sederajat
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah secara bertahap meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **2. Bidang kesehatan**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 12 (dua belas) program dan 42 (tiga puluh delapan) kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **a.1. Dinas Kesehatan**

- ❖ Pelaksanaan program sebanyak 7 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 20 unit

#### **a.2. Rumah Sakit Umum Daerah**

- ❖ Pelaksanaan program sebanyak 5 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 22 unit

Untuk selanjutnya, penjabaran program dan kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### **b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Pada Tahun 2012 jumlah RSUD yang berada dalam wilayah kota Langsa sebanyak 1 unit dengan luas area mencapai  $\pm 35.800 \text{ M}^2$ , Klasifikasi dan jumlah ruang rawat inap pada RSUD kota langsa dapat dilihat sebagai berikut :

**KLASIFIKASI DAN JUMLAH RUANG RAWAT INAP  
RSUD KOTA LANGSA TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI RUANG RAWAT INAP</b>	<b>JUMLAH (KAMAR)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ruang Kelas Utama A (Super VIP)	7	7 TT
2.	Ruang Kelas Utama B	14	14 TT
3.	Ruang ICU	3	6 TT
4.	Ruang ICCU	1	5 TT
5.	Ruang Bersalin (Kramzal)	10	33 TT
6.	Ruang Neotetanus	1	9 Inkb 22 Box
7.	Ruang VIP	4	4 TT
8.	Ruang Kelas I A	6	12 TT
9.	Ruang Kelas I B	5	10 TT
10.	Ruang Anak	8	25 TT
11.	RPBA	6	24 TT
12.	RPBB	7	25 TT
13.	Ruang THT-Mata	11	22 TT
14.	Ruang Kelas II	7	25 TT
15.	Ruang Kelas III Pria	5	28 TT
16.	Ruang Kelas III wanita	6	34 TT
	<b>JUMLAH</b>	<b>101</b>	

Sementara itu, dokter yang tersedia pada RSUD Kota langsa adalah sebanyak 48 Orang, pencatatan jenis penyakit yang ditangani pada tahun 2012 setidaknya sebanyak 6 jenis penyakit, berikut penjabarannya.

**DOKTER YANG TERSEDIA PADA RSUD KOTA LANGSA  
TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI JENIS DOKTER</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dokter Bedah	2	
2.	Dokter anak	4	
3.	Dokter Kandungan	3	
4.	Dokter Jantung	1	
5.	Dokter Kulit-kelamin	1	
6.	Dokter Radiologi	1	
7.	Dokter Paru	1	
8.	Dokter THT	2	
9.	Dokter Mata	2	
10.	Dokter Internist (Penyakit Dalam)	4	
11.	Dokter Jiwa	2	Part Time
12.	Dokter Neorologi (Saraf)	2	Part Time+PPDS
13.	Dokter Anastesi	1	
14.	Dokter Patologi Klinik	1	Part Time
15.	Dokter Gigi	5	
16.	Dokter Umum	16	
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	

**KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT YANG DITANGANI PADA  
TAHUN 2012**

NO	KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	DBD	171	
2.	Malaria	9	
3.	TB. Paru	317	
4.	Kusta	-	
5.	Diare	1164	
6.	HIV/AIDS	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>1663</b>	

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan kesehatan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
b.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,34%
c.	Cakupan desa/kelurahan Universitas Chil Immunization (UCI)	34,85%
d.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
e.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	59,97%
f.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00%
g.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	15,79%
h.	Cakupan kunjungan bayi	89,67%

**c. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib bidang kesehatan sebanyak 2 SKPD, yaitu :

1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup pelayanan teknis kesehatan kepada masyarakat.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi**

Alokasi Anggaran Belanja urusan Wajib Bidang Kesehatan pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 79.545.156.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.645.385.479,- atau 77,50%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Kesehatan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 14.46%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang kesehatan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>B.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>				
<b>B.1.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
<b>B.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>23.141.696.687,00</b>	<b>23.071.772.259,00</b>	<b>(69.924.428,00)</b>	<b>99,70</b>
<b>B.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.309.055.000,00</b>	<b>1.083.878.507,00</b>	<b>(225.176.493,00)</b>	<b>82,80</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	3.992.000,00	(8.000,00)	99,80
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	346.600.000,00	150.651.941,00	(195.948.059,00)	43,47
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	9.587.004,00	(412.996,00)	95,87
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.500.000,00	22.423.000,00	(77.000,00)	99,66
	5. Penyediaan alat tulis kantor	37.450.000,00	36.835.800,00	(614.200,00)	98,36
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	55.200.000,00	55.196.680,00	(3.320,00)	99,99
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42.080.000,00	41.965.710,00	(114.290,00)	99,73
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	9.986.030,00	(13.970,00)	99,86
	9. Penyediaan makanan dan minuman	88.500.000,00	84.023.000,00	(4.477.000,00)	94,94
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	165.200.000,00	165.107.342,00	(92.658,00)	99,94
	11. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	527.525.000,00	504.110.000,00	(23.415.000,00)	95,56
<b>B.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>246.750.000,00</b>	<b>245.484.000,00</b>	<b>(1.266.000,00)</b>	<b>99,49</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	11.964.000,00	(36.000,00)	99,70
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	234.750.000,00	233.520.000,00	(1.230.000,00)	99,48
<b>B.1.4.</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.876.409.000,00</b>	<b>1875769000,00</b>	<b>(640.000,00)</b>	<b>99,97</b>
	1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	131.800.000,00	131800000,00	-	100,00
	2 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.744.609.000,00	1743969000,00	(640.000,00)	99,96

1	2	3	4	5	6
	<b>B.1.5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>205.250.100,00</b>	<b>198.976.100,00</b>	<b>(6.274.000,00)</b>	<b>96,94</b>
	1. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	154.050.100,00	148.800.100,00	(5.250.000,00)	96,59
	2. Peningkatan Imuniasasi	51.200.000,00	50.176.000,00	(1.024.000,00)	98,00
				-	
	<b>B.1.6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	<b>1.806.520.270,00</b>	<b>1.723.411.000,00</b>	<b>(83.109.270,00)</b>	<b>95,40</b>
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.806.520.270,00	1.723.411.000,00	(83.109.270,00)	95,40
				-	
	<b>B.1.7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>2.648.410.000,00</b>	<b>650.700.325,00</b>	<b>(1.997.709.675,00)</b>	<b>24,57</b>
	1. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	2.648.410.000,00	650.700.325,00	(1.997.709.675,00)	24,57
				-	
	<b>B.1.8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1.152.000.000,00</b>	<b>922.121.948,00</b>	<b>(229.878.052,00)</b>	<b>80,05</b>
	1. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu	1.152.000.000,00	922.121.948,00	(229.878.052,00)	80,05
				-	
	<b>B.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>				
	<b>B.2.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>24.075.765.248,00</b>	<b>23.745.209.024,00</b>	<b>(330.556.224,00)</b>	<b>98,63</b>
				-	
	<b>B.2.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>21.622.549.873,00</b>	<b>6.684.148.516,00</b>	<b>(14.938.401.357,00)</b>	<b>30,91</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	590.000,00	589.000,00	(1.000,00)	99,83
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	506.500.000,00	470.988.326,00	(35.511.674,00)	92,99
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	116.558.898,00	116.558.898,00	-	100,00
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.475.000,00	20.475.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan alat tulis kantor	48.380.871,00	48.380.871,00	-	100,00
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	43.322.800,00	43.322.800,00	-	100,00
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.533.470,00	26.533.470,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	2.955.000,00	(7.045.000,00)	29,55
	10. Penyediaan makanan dan minuman	171.000.000,00	124.919.992,00	(46.080.008,00)	73,05
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	225.600.000,00	219.359.500,00	(6.240.500,00)	97,23
	12. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	20.453.588.834,00	5.610.065.659,00	(14.843.523.175,00)	27,43

1	2	3	4	5	6
	<b>B.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.195.100.000,00</b>	<b>1.191.000.000,00</b>	<b>(4.100.000,00)</b>	<b>99,66</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	1.122.350.000,00	1.118.250.000,00	(4.100.000,00)	99,63
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	0,00
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.750.000,00	60.750.000,00	-	100,00
	5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	0,00
	<b>B.2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>83,33</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	83,33
	<b>B.2.5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>(2.700.000,00)</b>	<b>95,98</b>
	1 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	-	-	0,00
	2 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	67.200.000,00	64.500.000,00	(2.700.000,00)	95,98
	<b>B.2.6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>138.450.000,00</b>	<b>138.414.800,00</b>	<b>(35.200,00)</b>	<b>99,97</b>
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	69.000.000,00	68.964.800,00	(35.200,00)	99,95
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	69.450.000,00	69.450.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.545.156.178,00</b>	<b>61.645.385.479,00</b>	<b>(17.899.770.699,00)</b>	<b>77,50</b>

#### **f. Proses Perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kesehatan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan ketersediaan ruang rawat inap pada RSUD yang belum mencukupi, mengingat masyarakat kabupaten aceh timur dan Aceh Tamiang masih merujuk kesehatan mereka kepada RSUD kota Langsa.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum memadai.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah penambahan sarana dan prasarana medis maupun non medis secara bertahap.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

### **3. Bidang Pekerjaan Umum**

#### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 8 (delapa) Program dan 23 (Dua puluh tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

#### **b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pekerjaan Umum dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	81,35%
c.	Rumah tangga bersanitasi	88,42%
d.	Kawasan kumuh	15,00%

#### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.933.054.076,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.210.951.640,- Atau sebesar 96.55%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang pekerjaan Umum terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 4,74%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang pekerjaan umum berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>C.</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>				
	<b>C.1. DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
	<b>C.1.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>4.002.333.076,00</b>	<b>3.948.012.677,00</b>	<b>-54.320.399,00</b>	<b>98,64</b>
	<b>C.1.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>575.917.000,00</b>	<b>545.651.463,00</b>	<b>-30.265.537,00</b>	<b>94,74</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.000.000,00	63.197.696,00	-12.802.304,00	83,15
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	5.364.558,00	-635.442,00	89,41
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	5. Penyediaan alat tulis kantor	22.400.000,00	22.346.515,00	-53.485,00	99,76
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	34.979.010,00	-20.990,00	99,94
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	4.613.600,00	-2.886.400,00	61,51
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	4.197.334,00	-1.802.666,00	69,96
	10. Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	4.058.000,00	-9.942.000,00	28,99
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	153.000.000,00	150.885.750,00	-2.114.250,00	98,62
	12. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	238.917.000,00	238.909.000,00	-8.000,00	100,00
	<b>C.1.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.905.500.000,00</b>	<b>2.451.436.000,00</b>	<b>-454.064.000,00</b>	<b>84,37</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	2.517.200.000,00	2.063.900.000,00	-453.300.000,00	81,99
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	290.000.000	289.500.000	-500.000,00	99,83
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	78.300.000	78.036.000	-264.000,00	99,66
	<b>C.1.4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>5.008.784.000,00</b>	<b>4975927500,00</b>	<b>-32.856.500,00</b>	<b>99,34</b>
	1. Pembangunan Jalan	3.880.034.000,00	3853840000	-26.194.000,00	99,32
	2. Pembangunan Jembatan	1.128.750.000,00	1122087500,00	-6.662.500,00	99,41

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>C.1.5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	<b>2.904.634.000,00</b>	<b>2.902.634.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>99,93</b>
	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.904.634.000,00	2.902.634.000,00	-2.000.000,00	99,93
	<b>C.1.6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>3.231.560.000,00</b>	<b>3.203.240.000,00</b>	<b>-28.320.000,00</b>	<b>99,12</b>
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3.231.560.000,00	3.203.240.000,00	-28.320.000,00	99,12
	<b>C.1.7. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>83,87</b>
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	62.000.000,00	52.000.000,00	-10.000.000,00	83,87
	<b>C.1.8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>2.174.326.000,00</b>	<b>2.064.050.000,00</b>	<b>-110.276.000,00</b>	<b>94,93</b>
	1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.174.326.000,00	2.064.050.000,00	-110.276.000,00	94,93
	<b>C.1.9. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.933.054.076,00</b>	<b>20.210.951.640,00</b>	<b>(832.378.436,00)</b>	<b>96,55</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan laboratorium serta alat penunjang teknis pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Pekerjaan umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**4. Bidang Perumahan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Perumahan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

## **b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Rumah tangga penggunaan air bersih	18,19%
b.	Lingkungan pemukiman kumuh	15,00%
c.	Rumah layak huni	85,22%

## **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Perumahan adalah kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

## **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

## **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Perumahan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 7.692.705.142,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.264.662.349,- atau sebesar 94,44%. Sementara itu realisasi belanja urusan

wajib bidang perumahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,70%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang perumahan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PERUMAHAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>D.</b>	<b>BIDANG PERUMAHAN</b>				
<b>D.1.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				
<b>D.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	1.451.060.142,00	1.369.038.550,00	<b>(82.021.592,00)</b>	<b>94,35</b>
<b>D.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.838.445.000,00</b>	<b>4.496.013.401,00</b>	<b>(342.431.599,00)</b>	<b>92,92</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152.200.000,00	148.191.589,00	(4.008.411,00)	97,37
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,80
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,88
	5. Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	39.992.028,00	(7.972,00)	99,98
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	44.950.000,00	44.928.000,00	(22.000,00)	99,95
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.950.000,00	257.850.000,00	(100.000,00)	99,96
	9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	11. Penyediaan makanan dan minuman	104.500.000,00	104.465.000,00	(35.000,00)	99,97
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	366.160.000,00	365.936.784,00	(223.216,00)	99,94
	13. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	3.818.085.000,00	3.480.065.000,00	(338.020.000,00)	91,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00
<b>D.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>774.700.000,00</b>	<b>771.937.898,00</b>	<b>(2.762.102,00)</b>	<b>99,64</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	42.279.000,00	(2.721.000,00)	93,95
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	451.000.000,00	451.000.000,00	-	100,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	263.700.000,00	263.658.898,00	(41.102,00)	99,98
<b>D.1.5.</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>628.500.000,00</b>	<b>627.672.500,00</b>	<b>(827.500,00)</b>	<b>99,87</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	362.000.000,00	361.902.500,00	(97.500,00)	99,97
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	266.500.000,00	265.770.000,00	(730.000,00)	99,73
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.692.705.142,00</b>	<b>7.264.662.349,00</b>	<b>(428.042.793,00)</b>	<b>94,44</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Perumahan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan jumlah armada pemadam kebakaran yang belum mencukupi pada kantor pemadam Kebakaran dan penanggulangna Bencana.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

## **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 11 (sepuluh) Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 10 unit
  - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 30 unit

b.2. Sekretaris Daerah

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perencanaan Pembangunan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
b.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
c.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
d.	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sekretariat Daerah sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur organisasi Sekretariat daerah yang menjadi mitra pelaksanaan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan Daerah adalah Bagian Administrasi Pembangunan.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Perencanaan pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 5.442.467.685,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.030.796.184,- atau sebesar 92,78%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang perencanaan pembangunan daerah terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,18%

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>E.</b>	<b>BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
<b>E.1.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
<b>E.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.979.544.136,00</b>	<b>1.936.781.098,00</b>	<b>(42.763.038,00)</b>	<b>97,84</b>
<b>E.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	774.803.000,00	771.534.522,00	(3.268.478,00)	99,58
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.200.000,00	55.811.672,00	(2.388.328,00)	95,90
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	32.000.000,00	31.990.000,00	(10.000,00)	99,97
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.250.000,00	33.246.250,00	(3.750,00)	99,99
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	25.984.500,00	(15.500,00)	99,94
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.250.000,00	33.000.000,00		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000,00	13.791.000,00	(209.000,00)	98,51
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	298.500.000,00	298.350.100,00	(149.900,00)	99,95
12	Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	261.603.000,00	261.363.000,00	(240.000,00)	99,91
<b>E.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>25.450.500,00</b>	<b>(1.399.500,00)</b>	<b>94,79</b>
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.900.000,00	12.822.000,00	(78.000,00)	99,40
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.950.000,00	12.628.500,00	(1.321.500,00)	90,53
<b>E.1.4.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>216.655.000,00</b>	<b>216.655.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	130.827.500,00	130.827.500,00	-	100,00
2.	Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	85.827.500,00	-	100,00
<b>E.1.5.</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>59.328.000,00</b>	<b>58.402.000,00</b>	<b>(926.000,00)</b>	<b>98,44</b>
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	59.328.000,00	58.402.000,00	(926.000,00)	98,44

1	2	3	4	5	6
	<b>E.1.6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>47.501.000,00</b>	<b>47.401.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>99,79</b>
	1 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	47.501.000,00	47.401.000,00	(100.000,00)	99,79
	<b>E.1.7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	136.597.100,00	136.000.100,00	(597.000,00)	99,56
	1. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	87.397.100,00	86.800.100,00	(597.000,00)	99,32
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pendampingan RIPJM Kota Langsa	49.200.000,00	49.200.000,00	-	100,00
	<b>E.1.8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1.127.129.500,00	1.123.988.200,00	(3.141.300,00)	99,72
	1. Penyusunan Rancangan RPJMD	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00
	2. Penyusunan Rancangan RKPD	115.000.000,00	115.000.000,00	-	100,00
	3. Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK	68.067.200,00	68.067.200,00	-	100,00
	4. Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	321.867.500,00	319.967.500,00	(1.900.000,00)	99,41
	5. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional	222.194.800,00	220.953.500,00	(1.241.300,00)	99,44
	<b>E.1.9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	169.160.000,00	156.994.850,00	(12.165.150,00)	92,81
	1. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	94.160.000,00	93.945.000,00	(215.000,00)	99,77
	2. Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP	75.000.000,00	63.049.850,00	(11.950.150,00)	84,07
	<b>E.1.10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	172.549.000,00	172.548.314,00	(686,00)	100,00
	1. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00
	2. Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	92.549.000,00	92.548.314,00	(686,00)	100,00
	<b>E.1.11 Program Penataan Ruang</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>149.287.000,00</b>	(200.713.000,00)	42,65
	1. Revisi/ Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa	350.000.000,00	149.287.000,00	(200.713.000,00)	42,65
	<b>E.2. SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	<b>E.2.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>409.851.949,00</b>	<b>283.154.600,00</b>	<b>(126.697.349,00)</b>	<b>69,09</b>
	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	62.733.000,00	62.733.000,00	-	100,00
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.527.000,00	30.527.000,00	-	100,00
	3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	316.591.949,00	189.894.600,00	(126.697.349,00)	59,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.422.467.685,00</b>	<b>5.030.796.184,00</b>	<b>(391.671.501,00)</b>	<b>92,78</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjangkaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Perencanaan pembangunan daerah masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Penerapan Dokumen Perencanaan pada SKPD belum optimal.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **6. Bidang Perhubungan**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Perhubungan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### **b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perhubungan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Angkutan darat	12,00%

### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

#### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Perhubungan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 2.774.589.634,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.745.740.693,- atau sebesar 98,96%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang perhubungan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,64%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang perhubungan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>F.</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
<b>F.1.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>F.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.276.302.290,00</b>	<b>2.249.029.373,00</b>	<b>2.097.080.793,00</b>	<b>98,80</b>
<b>F.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.262.622.793,00	1.212.573.268,00	<b>(50.049.525,00)</b>	<b>96,04</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.895.000,00	2.895.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.250.000,00	120.942.496,00	(43.307.504,00)	73,63
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.894.938,00	2.893.312,00	(1.626,00)	99,94
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.002.960,00	14.962.000,00	(40.960,00)	99,73
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.051.320,00	23.042.710,00	(8.610,00)	99,96
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.509.860,00	13.508.800,00	(1.060,00)	99,99
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.851.115,00	6.842.250,00	(8.865,00)	99,87
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.816.600,00	4.720.000,00	(96.600,00)	97,99
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	7.720.000,00	7.719.000,00	(1.000,00)	99,99
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	139.524.000,00	139.125.700,00	(398.300,00)	99,71
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	852.107.000,00	845.922.000,00	(6.185.000,00)	99,27
<b>F.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>188.220.000,00</b>	<b>188.164.720,00</b>	<b>(55.280,00)</b>	<b>99,97</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	5.965.000,00	(35.000,00)	99,42
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	182.220.000,00	182.199.720,00	(20.280,00)	99,99
<b>F.1.4.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>33.692.344,00</b>	<b>32.171.600,00</b>	<b>(1.520.744,00)</b>	<b>95,49</b>
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	33.692.344,00	32.171.600,00	(1.520.744,00)	95,49
<b>F.1.5.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>276.375.000,00</b>	<b>276.375.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas	276.375.000,00	276.375.000,00	-	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.774.589.634,00</b>	<b>2.745.740.693,00</b>	<b>(28.848.941,00)</b>	<b>98,96</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Perhubungan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan lokasi pelayanan Uji kelayakan Kendaraan (KIR) kepada angkutan yang belum memenuhi standar.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
  
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana pelayanan Bidang Perhubungan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## 7. Bidang Lingkungan Hidup

### a. Program dan kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan Lingkungan Hidup dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Penanganan sampah	20,15%
b.	Kebersihan	100%
c.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	00%
d.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,05%
e.	Penegakan hukum lingkungan	00%

### c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan

Hidup, kebersihan dan Pertamanan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang lingkungan hidup pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.176.111.578,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.981.555.820,- atau sebesar 98,72%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang lingkungan hidup terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 3,51%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang lingkungan hidup berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :



**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>G.</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
<b>G.1.</b>	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>				
<b>G.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.543.034.078,00</b>	<b>1.512.727.348,00</b>	<b>(30.306.730)</b>	<b>98,04</b>
<b>G.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.240.995.000</b>	<b>4.166.609.212</b>	<b>(74.385.788)</b>	<b>98,25</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.142.800.000,00	3.075.892.043,00	(66.907.957)	97,87
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85.300.000,00	85.229.500,00	(70.500)	99,92
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	9.236.000,00	(764.000)	92,36
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	27.983.000,00	(17.000)	99,94
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.986.200,00	(13.800)	99,90
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	792.887.000,00	792.615.250,00	(271.750)	99,97
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	4.990.000,00		
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000)	0,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	105.000.000,00	104.669.219,00	(330.781)	99,68
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	49.008.000,00	49.008.000,00	-	100,00
<b>G.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.283.850.000</b>	<b>1.270.255.000</b>	<b>(13.595.000)</b>	<b>98,94</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	828.500.000,00	817.085.000,00	(11.415.000)	98,62
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	84.000.000,00	82.672.500,00	(1.327.500)	98,42
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	371.350.000,00	370.497.500,00		
<b>G.1.4.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>6.757.582.500</b>	<b>6.687.443.500</b>	<b>(70.139.000)</b>	<b>98,96</b>
	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	6.044.400.000,00	6.031.127.500,00	(13.272.500)	99,78
	2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	697.166.500,00	640.416.000,00	(56.750.500)	91,86
	3. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	16.016.000,00	15.900.000,00	(116.000)	99,28

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>G.1.5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>227.900.000</b>	<b>227.895.000</b>	<b>(5.000)</b>	<b>100,00</b>
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	227.900.000	227.895.000	(5.000)	100,00
	<b>G.1.6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.122.750.000</b>	<b>1.116.625.760</b>	<b>(6.124.240)</b>	<b>99,45</b>
	1. Penataan RTH	609.750.000,00	605.852.000,00	(3.898.000)	99,36
	2. Pemeliharaan RTH	315.000.000,00	313.536.200,00	(1.463.800)	99,54
	3. Pengembangan Taman Rekreasi	198.000.000,00	197.237.560,00	(762.440)	99,61
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.176.111.578,00</b>	<b>14.981.555.820,00</b>	<b>(194.555.758)</b>	<b>98,72</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang lingkungan hidup dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjabaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang lingkungan hidup dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan jumlah armada pengangkut sampah yang belum mencukupi

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana persampahan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**8. Bidang Pertanahan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Sekretariat Daerah.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pertanahan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Luas lahan bersertifikat	65,10%
b.	Penyediaan kasus tanah negara	-
c.	Penyelesaian ijin lokasi	100%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Pertanahan adalah sekretariat daerah Bagian Pemerintahan Umum subbag pertanahan dan penataan wilayah yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Pertanahan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 516.487.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 442.360.820,- atau

sebesar 86,65%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang pertanahan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,10%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Pertanahan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PERTANAHAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
H.	BIDANG PERTANAHAN				
	H.1. SEKRETARIAT DAERAH				
	H.1.1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	516.487.000,00	442.360.820,00	(74.126.180,00)	85,65
	1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	516.487.000,00	442.360.820,00	(74.126.180,00)	85,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>516.487.000,00</b>	<b>442.360.820,00</b>	<b>(74.126.180,00)</b>	<b>85,65</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanahan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan..

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang pertanahan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD terkait
- d. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur
  - ❖

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program

dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

## **2. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kepemilikan KTP	74,40%
b.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	24,63 Per 1.000
c.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan catatan sipil pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 2.784.592.365,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.628.748.565 atau sebesar 94,40%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Kependudukan dan catatan sipil terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,62%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b>BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
<b>I.1.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
<b>I.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	1.750.145.303,00	1.670.942.992,00	(79.202.311,00)	95,47
<b>I.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>731.604.800,00</b>	<b>719.403.766,00</b>	<b>(12.201.034,00)</b>	<b>98,33</b>
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.050.000,00	38.721.516,00	(11.328.484,00)	77,37
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	-	100,00
	3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	34.200.000,00	34.140.000,00	(60.000,00)	99,82
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.430.000,00	93.430.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.500.000,00	177.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000,00	5.860.000,00	(40.000,00)	99,32
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.956.800,00	59.956.800,00	-	100,00
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	140.000.000,00	139.928.700,00	(71.300,00)	99,95
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	142.568.000,00	141.866.750,00	(701.250,00)	99,51
<b>I.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>22.950.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00
<b>I.1.4.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>209.940.000,00</b>	<b>209.280.000,00</b>	<b>(660.000,00)</b>	<b>99,69</b>
	1. Pengembangan Data Base Kependudukan	209.940.000,00	209.280.000,00	(660.000,00)	99,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.714.640.103,00</b>	<b>2.622.576.758,00</b>	<b>(92.063.345,00)</b>	<b>96,61</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan catatan sipil dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan catatan sipil dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Kependudukan dan catatan sipil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

❖ Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD terkait.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.

❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

### **10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

#### **b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat kami uraikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Pertisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,84%
b.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	98,88%
c.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	67,51%

#### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 3.206.332.724,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.147.547.960,- atau sebesar 98,17,62%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,73%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>J.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
<b>J.1.</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
<b>J.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.130.544.834,00</b>	<b>2.107.023.582,00</b>	<b>(23.521.252,00)</b>	<b>98,90</b>
<b>J.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>444.287.890,00</b>	<b>426.121.278,00</b>	<b>(18.166.612,00)</b>	<b>95,91</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.400.000,00	33.732.788,00	(17.667.212,00)	65,63
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.049.244,00	3.049.244,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.376.474,00	30.376.474,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.651.172,00	24.651.172,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	88.156.000,00	87.656.600,00	(499.400,00)	99,43
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	211.255.000,00	211.255.000,00	-	100,00
<b>J.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>63.750.000,00</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>97,41</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.600.000,00	58.950.000,00	(1.650.000,00)	97,28
<b>J.1.4.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	77.500.000,00	77.500.000,00	-	100,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>J.1.5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>122.288.700,00</b>	<b>(2.711.300,00)</b>	<b>97,83</b>
	1. Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	125.000.000,00	122.288.700,00	(2.711.300,00)	97,83
	<b>J.1.6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>96,72</b>
	1. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional	15.250.000,00	14.750.000,00	(500.000,00)	96,72
	<b>J.1.7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>337.764.400,00</b>	<b>(12.235.600,00)</b>	<b>96,50</b>
	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	350.000.000,00	337.764.400,00	(12.235.600,00)	96,50
				-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.206.332.724,00</b>	<b>3.147.547.960,00</b>	<b>(58.784.764,00)</b>	<b>98,17</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali ke dalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2

(dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Prevalensi peserta KB aktif	73,40%
b.	Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap Desa/Kelurahan	0,26%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **d. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 695.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 676.607.000,- atau sebesar 97,34%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,15%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KELUARGA BERENCANA  
DAN KELUARGA SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
K.	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				
K.1.	<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	695.067.000,00	676.607.000,00	(18.460.000,00)	97,34
K.1.1.	<b>Program Keluarga Berencana</b>	684.450.000,00	665.990.000,00	(18.460.000,00)	97,30
	1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	684.450.000,00	665.990.000,00	(18.460.000,00)	97,30
K.1.1.	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>	10.617.000,00	10.617.000,00	-	100,00
	1. Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB	10.617.000,00	10.617.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>695.067.000,00</b>	<b>676.607.000,00</b>	<b>(18.460.000,00)</b>	<b>97,34</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **12. Bidang Sosial**

### **a. Program dan kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Sosial Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a.1. Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 15 unit

b.2. Sekretaris Daerah

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7 Unit
b.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	9,30%
c.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	7,53%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Sosial adalah sebanyak 2 SKPD, yaitu :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
2. Sekretariat Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan urusan wajib bidang sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, sementara itu Sekretariat daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup sinkronisasi dan koordinasi kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, bagian kerja dari pada struktur Organisasi Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan urusan wajib bidang sosial adalah bagian sosial dan kesejahteraan rakyat.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Sosial pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 4.567.016.234,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.442.354.856,- atau sebesar 97,27%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Sosial terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,04%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Sosial berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
L.	<b>BIDANG SOSIAL</b>				
L.1.	<b>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK</b>				
L.1.1.	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.564.747.103,00</b>	<b>2.530.994.105,00</b>	<b>(33.752.998,00)</b>	<b>98,68</b>
L.1.2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.477.866.631,00</b>	<b>1.438.783.151,00</b>	<b>(39.083.480,00)</b>	<b>97,36</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.286.240,00	(213.760,00)	93,89
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000,00	41.723.180,00	(5.276.820,00)	88,77
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62.000.000,00	61.643.452,00	(356.548,00)	99,42
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000,00	11.857.500,00	(142.500,00)	98,81
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.864.201,00	55.684.201,00	(180.000,00)	99,68
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.430.430,00	37.010.898,00	(419.532,00)	98,88
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000,00	13.311.020,00	(188.980,00)	98,60
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.663.000,00	(337.000,00)	94,38
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	683.150.000,00	656.843.760,00	(26.306.240,00)	96,15
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	139.150.000,00	137.468.900,00	(1.681.100,00)	98,79
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	418.272.000,00	414.291.000,00	(3.981.000,00)	99,05
L.1.3.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>76.450.000,00</b>	<b>74.933.000,00</b>	<b>(1.517.000,00)</b>	<b>98,02</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	76.450.000,00	74.933.000,00	(1.517.000,00)	98,02
L.1.4.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>(25.000,00)</b>	<b>99,50</b>
	1. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>L.1.5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	<b>362.550.000,00</b>	<b>328.664.600,00</b>	<b>(33.885.400,00)</b>	<b>90,65</b>
	1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	362.550.000,00	328.664.600,00	(33.885.400,00)	90,65
	<b>L.1.7. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>0,00</b>
	1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	0,00
	<b>L.2 SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	<b>L.2.1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>74.902.500,00</b>	<b>64.005.000,00</b>	<b>(10.897.500,00)</b>	<b>85,45</b>
	1. Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	74.902.500,00	64.005.000,00	(10.897.500,00)	85,45
				-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.567.016.234,00</b>	<b>4.442.354.856,00</b>	<b>(124.661.378,00)</b>	<b>97,27</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Sosial masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana sosial gedung kegiatan sosial dan lain-lain.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **13. Bidang Ketenagakerjaan**

### **a. Program dan kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang ketenagakerjaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun

Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketenagakerjaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	53,81%
b.	Pencari kerja yang ditempatkan	40,43%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 81.493.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.493.920,- atau sebesar 100%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang ketenagakerjaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang ketenagakerjaan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KETENAGAKERJAAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M.	BIDANG KETENAGAKERJAAN				
M.1.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	81.493.920,00	81.493.920,00	-	100,00
M.1.1.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	81.493.920,00	81.493.920,00	-	100,00
	1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.493.920,00	81.493.920,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>81.493.920,00</b>	<b>81.493.920,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali ke dalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjangkauan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan ada koordinasi terhadap SKPD terkait.
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **14. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

### **a. Program dan kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### **b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Koperasi dan UKM dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Koperasi aktif	55,42%
b.	Usaha mikro dan kecil	87,10%

### **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 35.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.066.000,- atau sebesar 99,66%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,008%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Koperasi dan UKM berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN UKM  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
N.	<b>BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>				
N.1.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>	35.080.000,00	35.066.000,00	(14.000,00)	99,96
N.1.1.	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	35.080.000,00	35.066.000,00	(14.000,00)	99,96
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	35.080.000,00	35.066.000,00	(14.000,00)	99,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>35.066.000,00</b>	<b>(14.000,00)</b>	<b>99,96</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UKM masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Koperasi dan UKM dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Koperasi dan UKM.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**15. Bidang Penanaman Modal**

**a. Program dan kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Penanaman Modal dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Langsa yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 79.192.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.192.000,- atau sebesar 100%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Sosial terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Penanaman Modal berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
O.	BIDANG PENANAMAN MODAL				
O.1.	Sekretariat Daerah Kota Langsa	79.192.000,00	79.192.000,00	-	100,00
O.1.1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	79.192.000,00	79.192.000,00	-	100,00
	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	79.192.000,00	79.192.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.192.000,00</b>	<b>79.192.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Penanaman Modal dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Penanaman Modal.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**16. Bidang Kebudayaan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang kebudayaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Sekretariat

Daerah dan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Kebudayaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0
b.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 Buah
c.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100,00%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 247.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.168.774,- atau sebesar 99.66%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang kebudayaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,06%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang kebudayaan berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
P.	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
P.1.	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.886.200,00</b>	<b>(113.800,00)</b>	<b>99,05</b>
	<b>P.1.1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.886.200,00</b>	<b>(113.800,00)</b>	<b>99,05</b>
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	12.000.000,00	11.886.200,00	(113.800,00)	99,05
P.2.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>234.282.574,00</b>	<b>(717.426,00)</b>	<b>99,69</b>
	<b>P.2.1. Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>84.974.000,00</b>	<b>(26.000,00)</b>	<b>99,97</b>
	1. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	85.000.000,00	84.974.000,00	(26.000,00)	99,97
	<b>P.2.2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>149.308.574,00</b>	<b>(691.426,00)</b>	<b>99,54</b>
	1. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	150.000.000,00	149.308.574,00	(691.426,00)	99,54
	<b>JUMLAH</b>	<b>247.000.000,00</b>	<b>246.168.774,00</b>	<b>(113.800,00)</b>	<b>99,66</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang kebudayaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kebudayaan dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

### **17. Bidang Kepemudaan dan olah Raga.**

#### **a. Program dan Evaluasi**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan kepemudaan dan Olah Raga dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Gelandang/balai remaja (selain milik swasta)	1,56%
b.	Lapangan Olahraga	1,58%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah raga adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan olah raga pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 4.832.871.411,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.590.367.294,- atau sebesar 94,98%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,00%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PEMUDA  
DAN OLAH RAGA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Q.</b>	<b>BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				
<b>Q.1.</b>	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>				
<b>Q.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.026.424.011,00</b>	<b>2.003.717.225,00</b>	<b>(22.706.786,00)</b>	<b>98,88</b>
<b>Q.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>381.105.000,00</b>	<b>361.399.919,00</b>	<b>(19.705.081,00)</b>	<b>94,83</b>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	9.144.419,00	(16.055.581,00)	36,29
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.050.000,00	22.050.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	158.000.000,00	157.017.500,00	(982.500,00)	99,38
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	115.755.000,00	113.088.000,00	(2.667.000,00)	97,70
<b>Q.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>77.775.000,00</b>	<b>(1.725.000,00)</b>	<b>97,83</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.500.000,00	17.775.000,00	(1.725.000,00)	91,15
<b>Q.1.4.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>14.651.250,00</b>	<b>(248.750,00)</b>	<b>98,33</b>
	1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	14.900.000,00	14.651.250,00	(248.750,00)	98,33

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Q.1.5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	<b>2.330.942.400,00</b>	<b>2.132.823.900,00</b>	<b>(198.118.500,00)</b>	<b>91,50</b>
	1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	710.000.000,00	710.000.000,00	-	100,00
	2. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah	715.942.400,00	525.823.900,00	(190.118.500,00)	73,45
	3. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	800.000.000,00	792.000.000,00	(8.000.000,00)	99,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.832.871.411,00</b>	<b>4.590.367.294,00</b>	<b>(242.504.117,00)</b>	<b>94,98</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang kepemudaan dan olah raga dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjangingan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kepemudaan dan olah raga dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Kepemudaan dan olah raga dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.

❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.

❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

### **18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Polotik Dalam Negeri**

#### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 10 (Sepuluh) Program dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a.1. Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 6 unit
  - ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 23 unit
- a.2. Kantor satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 14 unit
- a.3. Komisi Independen Pemilihan Umum
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Kegiatan
b.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Kegiatan

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri adalah sebanyak 3 SKPD, yaitu :

- 1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

3. Komisi Independen Pemilihan Umum

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sementara itu kantor satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup penyelenggaraan penertiban serta penegakan Qanun Daerah

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 9.677.685.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.955.681.451,- atau sebesar 92,54%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 2,10%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
R.	<b>BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				
R.1.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
R.1.1.	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.596.884.827,00</b>	<b>1.570.960.557,00</b>	(25.924.270,00)	98,38
R.1.2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>839.520.000,00</b>	<b>820.091.629,00</b>	(19.428.371,00)	97,69
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.680.000,00	21.506.997,00	(11.173.003,00)	65,81
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	2.999.712,00	(288,00)	99,99
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	9.500.000,00	9.432.720,00	(67.280,00)	99,29
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.632.500,00	146.682.500,00	(5.950.000,00)	96,10
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	5.320.000,00	(680.000,00)	88,67
	10. Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	4.935.000,00	(65.000,00)	98,70
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	64.000.000,00	62.517.200,00	(1.482.800,00)	97,68
	12. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	543.057.500,00	543.047.500,00	(10.000,00)	100,00
R.1.3.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>19.749.770,00</b>	(2.400.230,00)	89,16
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.000.000,00	1.999.770,00	(230,00)	99,99
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.150.000,00	17.750.000,00	(2.400.000,00)	88,09
R.1.4.	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>37.870.000,00</b>	<b>37.870.000,00</b>	-	100,00
	1. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	37.870.000,00	37.870.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>R.1.5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>93.460.000,00</b>	<b>92.235.000,00</b>	(1.225.000,00)	98,69
	1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	25.850.000,00	25.100.000,00	(750.000,00)	97,10
	2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	40.110.000,00	39.635.000,00		
	3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	27.500.000,00	27.500.000,00		
	<b>R.1.6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
	<b>R.1.7. Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>280.680.000,00</b>	<b>279.076.000,00</b>	(1.604.000,00)	99,43
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	176.920.000,00	175.911.000,00	(1.009.000,00)	99,43
	2. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	42.570.000,00	42.065.000,00	(505.000,00)	98,81
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	16.840.000,00	16.750.000,00	(90.000,00)	99,47
	4. Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM	44.350.000,00	44.350.000,00	-	100,00
	<b>R.2. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH</b>				
	<b>R.2.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.046.031.564,00</b>	<b>1.012.375.599,00</b>	(33.655.965,00)	96,78
	<b>R.2.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.333.239.169,00</b>	<b>3.708.705.603,00</b>	(624.533.566,00)	85,59
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.305.000,00	10.196.955,00	(5.108.045,00)	66,62
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.394.505,00	5.392.078,00	(2.427,00)	99,96
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	5.998.668,00	(1.332,00)	99,98
	5. Penyediaan alat tulis kantor	17.175.366,00	17.165.603,00	(9.763,00)	99,94
	6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	7.900.470,00	7.900.209,00	(261,00)	100,00
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.553.000,00	5.548.290,00	(4.710,00)	99,92
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.160.000,00	6.160.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160.000.000,00	159.448.000,00	(552.000,00)	99,66
	12. Penyediaan jasa kelancaran administrasi perkantoran	4.767.505.000,00	4.765.505.000,00	(2.000.000,00)	99,96
	<b>R.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>99.550.000,00</b>	<b>98.589.605,00</b>	(960.395,00)	99,04
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	48.150.000,00	47.295.000,00	(855.000,00)	98,22
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	51.400.000,00	51.294.605,00	(105.395,00)	99,79
	<b>R.2.4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>1.210.800.000,00</b>	<b>1.198.881.688,0000</b>	(11.918.312,00)	99,02
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	620.800.000,00	609.976.688,00	(10.823.312,00)	98,26
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	490.000.000,00	488.905.000,00	(1.095.000,00)	99,78
<b>R.3</b>	<b>SEKRETARIAT KPU/KIP</b>				
	<b>R.1.5. Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>84.646.000,00</b>	(354.000,00)	99,58
	1. Penyusunan Data Base Partai Politik	85.000.000,00	84.646.000,00	(354.000,00)	99,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.677.685.560,00</b>	<b>8.955.681.451,00</b>	<b>(722.004.109,00)</b>	<b>92,54</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **19. Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 48 (lima puluh dua) Program dan 238 (dua ratus tiga puluh sembilan) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **a.1. Sekretariat Daerah**

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 11 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 40 unit

#### **a.2. Sekretariat DPRK**

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 4 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 unit

#### **a.3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset**

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 unit

#### **a.4. Inspektorat**

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 4 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 unit

#### **a.5. Dinas Syariat Islam**

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit

- a.6. Sekretariat KIP
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 12 unit
- a.7. Kecamatan Langsa Kota
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
- a.8. Kecamatan Langsa Barat
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
- a.9. Kecamatan Langsa Timur
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
- a.10. Kecamatan Langsa Lama
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 unit
- a.11. Kecamatan Langsa Barö
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
- a.12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 17 unit
- a.13. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
  - ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

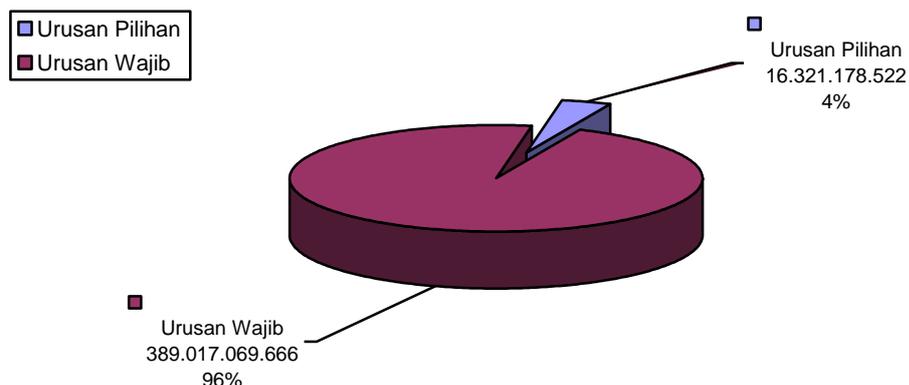
## b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Komposisi pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kota langsa pada tahun anggaran 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- b.1. Pelaksanaan urusan wajib sebanyak 25 (dua puluh lima) bidang pembangunan atau sebesar 96,15% terhadap total keseluruhan bidang pembangunan dalam urusan wajib yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) bidang pembangunan.
- b.2. pelaksanaan urusan pilihan sebanyak 6 (lima) bidang pembangunan, atau sebesar 75% terhadap total keseluruhan bidang pembangunan dalam urusan pilihan yaitu sebanyak 8 (delapan) bidang pembangunan.

Sementara itu, komposisi realisasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

### KOMPOSISI REALISASI BELANJA DAERAH KOTA LANGSA BERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2012



Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sebagai SKPD penanggung jawab pada tahun 2012 setidaknya telah menerbitkan izin sebanyak 3122 perizinan dengan kontribusi yang diperoleh sebesar Rp. 713.982.000,- berikut penjabarannya :

**KOMPOSISI PERIZINAN DAN KONTRIBUSI  
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2012**

No	NAMA PERIZINAN	JUMLAH PERIZINAN	PENDAPATAN RETRIBUSI PERIZINAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	131	222.841.000
2.	Ijin Gangguan	426	190.131.000
3.	SITU	825	tidak dikenakan retribusi
4.	SIUP/SIPI Kelautan Perikanan	50	5.724.000
5.	Ijin Menara Telokomunikasi	1	1.523.000
6.	Ijin Bidang Kesehatan	128	tidak dikenakan retribusi
7.	Ijin Sumur Bor	3	tidak dikenakan retribusi
8.	SIUP	618	tidak dikenakan retribusi
9.	TDP	615	tidak dikenakan retribusi
10.	TDI	4	tidak dikenakan retribusi
11.	IUJK	78	tidak dikenakan retribusi
12.	Badan Hukum Koperasi	7	tidak dikenakan retribusi
13.	Izin Reklame	236	293.763.000
14.	Ijin Lainnya	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3122</b>	<b>713.982.000</b>

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan sumber daya, motivasi serta apresiasi kepada aparatur, pemerintah kota langsa pada tahun 2012, setidaknya telah memberikan izin belajar kepada PNS sebanyak 143 orang, Tugas Belajar sebanyak 18 orang, dengan penjabaran sebagai berikut :

**PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR  
PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM BENTUK PEMBERIAN  
IZIN DANTUGAS BELAJAR PADA TAHUN 2011**

No	JENIS PENJABARAN	TINGKAT PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PROFESI					JUMLAH
		D3	S1	S2	S3	SPEKIALIS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	IZIN BELAJAR	11	107	-	1	-	119
2.	TUGAS BELAJAR	-	6	15	-	3	24
JUMLAH		11	113	15	1	3	143

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebanyak 13 SKPD, yaitu :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRK
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
4. Inspektorat
5. Dinas Syariat Islam
6. Sekretariat KIP
7. Kecamatan Langsa Kota
8. Kecamatan Langsa Barat
9. Kecamatan Langsa Timur
10. Kecamatan Langsa Lama
11. kecamatan Langsa Barö
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
13. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Keseluruhan SKPD tersebut bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan cakupan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- c.1. Sekretariat daerah bertindak sebagai mitra pelaksanaan dengan ruang lingkup penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- c.2. Sekretariat DPRK bertindak sebagai pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.
- c.3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset bertindak sebagai pengelolaan keuangan daerah
- c.4. Inspektorat bertindak sebagai pengawasan, pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan gampong/desa
- c.5. Dinas Syariat Islam bertindak sebagai pelaksanaan Syariat Islam
- c.6. Sekretariat KIP bertindak sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum
- c.7. Kecamatan Langsa Kota, Barat, Timur, Lama dan Barö bertindak sebagai pelaksanaan pemerintahan gampong/desa

- c.8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) bertindak sebagai pelaksanaan pelayanan perijinan
- c.9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertindak sebagai pelaksanaan Kepegawaian daerah

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 93.072.227.931,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.892.182.409,56 atau sebesar 95,51%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 21,00%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,  
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN  
DAN PERSANDIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>S.</b>	<b>BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>				
<b>S.1.</b>	<b>WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>494.116.390,00</b>	<b>345.633.375,00</b>	<b>(148.483.015,00)</b>	<b>69,95</b>
<b>Q.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>494.116.390,00</b>	<b>345.633.375,00</b>	<b>(148.483.015,00)</b>	<b>69,95</b>
<b>S.2.</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA</b>	<b>3.792.357.208,00</b>	<b>3.727.171.248,00</b>	<b>(65.185.960,00)</b>	<b>98,28</b>
<b>Q.2.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>3.792.357.208,00</b>	<b>3.727.171.248,00</b>	<b>(65.185.960,00)</b>	<b>98,28</b>
<b>S.3.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
<b>S.3.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>7.903.369.671,00</b>	<b>7.776.093.969,00</b>	<b>(127.275.702,00)</b>	<b>98,39</b>
<b>S.3.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>13.645.651.000,00</b>	<b>13.108.786.422,00</b>	<b>(536.864.578,00)</b>	<b>96,07</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.000.000,00	28.115.600,00	(8.884.400,00)	75,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.800.000,00	350.375.326,00	(108.424.674,00)	76,37
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	90.000.000,00	64.885.097,00	(25.114.903,00)	72,09
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	101.527.000,00	93.843.000,00	(7.684.000,00)	92,43
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	385.900.000,00	368.436.981,00	(17.463.019,00)	95,47
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	235.000.000,00	233.678.500,00	(1.321.500,00)	99,44
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.000.000,00	157.466.000,00	(2.534.000,00)	98,42
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	91.949.100,00	(8.050.900,00)	91,95
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.280.000,00	240.875.000,00	(4.405.000,00)	98,17
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.800.000,00	19.258.500,00	(6.541.500,00)	74,65
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.000.000,00	20.435.000,00	(565.000,00)	97,31

1	2	3	4	5	6
	12 Penyediaan Makanan dan Minuman	1.434.411.000,00	1.347.981.300,00	(86.429.700,00)	93,97
	13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	3.240.000.000,00	3.129.357.318,00	(110.642.682,00)	96,59
	14 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	7.110.933.000,00	6.962.129.700,00	(148.803.300,00)	97,91
	<b>S.3.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.651.524.000,00</b>	<b>2.451.357.318,00</b>	<b>(200.166.682,00)</b>	<b>92,45</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	335.000.000,00	272.246.000,00	(62.754.000,00)	81,27
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	176.385.000,00	176.385.000,00	-	100,00
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	900.585.000,00	891.326.000,00	(9.259.000,00)	98,97
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	200.204.000,00	187.763.000,00	(12.441.000,00)	93,79
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	290.000.000,00	241.945.775,00	(48.054.225,00)	83,43
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	736.750.000,00	670.192.043,00	(66.557.957,00)	90,97
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12.600.000,00	11.499.500,00	(1.100.500,00)	91,27
	<b>S.3.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>86.889.000,00</b>	<b>85.658.000,00</b>	<b>(1.231.000,00)</b>	<b>98,58</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	86.889.000,00	85.658.000,00	(1.231.000,00)	98,58
	<b>S.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>39.069.900,00</b>	<b>37.897.800,00</b>	<b>(1.172.100,00)</b>	<b>97,00</b>
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.069.900,00	37.897.800,00	(1.172.100,00)	97,00
	<b>S.3.6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.344.000.000,00</b>	<b>1.095.363.000,00</b>	<b>(248.637.000,00)</b>	<b>81,50</b>
	1. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	197.000.000,00	134.624.200,00	(62.375.800,00)	68,34
	2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	260.000.000,00	206.638.000,00	(53.362.000,00)	79,48
	3. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	313.500.000,00	252.153.000,00	(61.347.000,00)	80,43
	4. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	93.500.000,00	93.226.000,00	(274.000,00)	99,71
	5. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	187.104.800,00	(12.895.200,00)	93,55
	6. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	70.000.000,00	40.000.000,00	(30.000.000,00)	57,14

1	2	3	4	5	6
	7. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota)	210.000.000,00	181.617.000,00	(28.383.000,00)	86,48
	<b>S.3.7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>214.836.000,00</b>	<b>210.902.000,00</b>	<b>(3.934.000,00)</b>	<b>98,17</b>
	1. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	25.956.000,00	25.956.000,00	-	100,00
	2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	188.880.000,00	184.946.000,00	(3.934.000,00)	97,92
	<b>S.3.8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>86.768.690,00</b>	<b>86.768.690,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	86.768.690,00	86.768.690,00	-	100,00
	<b>S.3.9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>53.316.300,00</b>	<b>50.894.100,00</b>	<b>(2.422.200,00)</b>	<b>95,46</b>
	1. Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan	53.316.300,00	50.894.100,00	(2.422.200,00)	95,46
	<b>S.3.10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>175.946.673,00</b>	<b>174.446.673,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>99,15</b>
	1. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	175.946.673,00	174.446.673,00	(1.500.000,00)	99,15
	<b>S.3.11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>299.258.750,00</b>	<b>299.258.244,00</b>	<b>(506,00)</b>	<b>100,00</b>
	1. Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum	80.536.000,00	80.535.500,00	(500,00)	100,00
	2. Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Qanun	125.242.750,00	125.242.744,00	(6,00)	100,00
	3. Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum	93.480.000,00	93.480.000,00	-	100,00
	<b>S.3.12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>61.560.800,00</b>	<b>36.039.900,00</b>	<b>(25.520.900,00)</b>	<b>58,54</b>
	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.624.915,00	20.324.915,00	(300.000,00)	98,55
	2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan	164.060.700,00	155.772.700,00	(8.288.000,00)	94,95

1	2	3	4	5	6
	<b>S.4. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA</b>				
	<b>S.4.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.234.880.940,00</b>	<b>2.206.653.585,00</b>	<b>(28.227.355,00)</b>	<b>98,74</b>
	<b>S.4.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.702.670.431,00</b>	<b>4.333.135.699,00</b>	<b>(369.534.732,00)</b>	<b>92,14</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.981.000,00	286.499.988,00	(5.481.012,00)	98,12
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.000.000,00	10.046.109,00	(6.953.891,00)	59,09
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	122.200.000,00	101.281.342,00	(20.918.658,00)	82,88
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.500.000,00	48.748.040,00	(11.751.960,00)	80,58
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.980.000,00	88.607.772,00	(2.372.228,00)	97,39
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.800.000,00	16.476.356,00	(10.323.644,00)	61,48
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461.492.000,00	427.704.109,00	(33.787.891,00)	92,68
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000,00	66.379.000,00	(621.000,00)	99,07
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	340.000.000,00	274.248.750,00	(65.751.250,00)	80,66
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.460.572.431,00	1.338.693.233,00	(121.879.198,00)	91,66
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.762.145.000,00	1.672.453.000,00	(89.692.000,00)	94,91
	<b>S.4.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>411.540.625,00</b>	<b>384.206.905,00</b>	<b>(27.333.720,00)</b>	<b>93,36</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	83.125.000,00	(26.875.000,00)	75,57
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	170.600.000,00	170.430.155,00	(169.845,00)	99,90
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	130.940.625,00	130.651.750,00	(288.875,00)	99,78
	<b>S.4.4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>1.526.025.000,00</b>	<b>1.449.456.934,00</b>	<b>(76.568.066,00)</b>	<b>94,98</b>
	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	141.863.122,00	92.633.122,00	(49.230.000,00)	65,30
	2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	57.629.500,00	56.413.400,00	(1.216.100,00)	97,89
	3. Rapat-Rapat Paripurna	196.150.000,00	190.925.214,00	(5.224.786,00)	97,34
	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	875.025.000,00	853.620.000,00	(21.405.000,00)	97,55
	<b>S.4.5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>33.285.518,00</b>	<b>(1.714.482,00)</b>	<b>95,10</b>
	1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	33.285.518,00	(1.714.482,00)	95,10

1	2	3	4	5	6
	<b>S.5. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET</b>				
	<b>S.5.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>8.309.649.518,00</b>	<b>8.131.556.322,00</b>	<b>(178.093.196,00)</b>	<b>97,86</b>
	<b>S.5.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.883.805.000,00</b>	<b>3.188.797.326,56</b>	<b>(695.007.673,44)</b>	<b>82,10</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.600.000,00	186.803.013,00	(21.796.987,00)	89,55
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	125.350.000,00	99.147.293,56	(26.202.706,44)	79,10
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.000.000,00	18.797.840,00	(2.202.160,00)	89,51
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.000.000,00	56.887.700,00	(3.112.300,00)	94,81
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	170.000.000,00	165.076.300,00	(4.923.700,00)	97,10
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	375.800.000,00	373.769.680,00	(2.030.320,00)	99,46
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.000.000,00	29.723.900,00	(2.276.100,00)	92,89
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.000.000,00	240.000.000,00	(192.000.000,00)	55,56
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	160.000.000,00	152.832.000,00	(7.168.000,00)	95,52
	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000,00	348.282.100,00	(51.717.900,00)	87,07
	13. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.887.055.000,00	1.505.477.500,00	(381.577.500,00)	79,78
	<b>S.5.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>148.900.000,00</b>	<b>136.779.900,00</b>	<b>(12.120.100,00)</b>	<b>91,86</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33.900.000,00	21.779.900,00	(12.120.100,00)	64,25
	<b>S.5.4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.202.568.561,00</b>	<b>3.093.903.010,00</b>	<b>(108.665.551,00)</b>	<b>96,61</b>
	1. Penyusunan Standar Satuan Harga	140.149.460,00	140.149.460,00	-	100,00
	2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.290.719.101,00	1.251.959.850,00	(38.759.251,00)	97,00
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	532.000.000,00	531.949.600,00	(50.400,00)	99,99

1	2	3	4	5	6
	5. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	255.000.000,00	188.054.850,00	(66.945.150,00)	73,75
	6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	627.700.000,00	624.828.300,00	(2.871.700,00)	99,54
	7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	357.000.000,00	356.960.950,00	(39.050,00)	99,99
	<b>S.6. INSPEKTORAT</b>				
	<b>S.6.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.961.577.204,00</b>	<b>2.936.679.997,00</b>	<b>(24.897.207,00)</b>	<b>99,16</b>
	<b>S.6.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>466.112.000,00</b>	<b>462.192.215,00</b>	<b>(3.919.785,00)</b>	<b>99,16</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.265.040,00	(334.960,00)	87,12
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	22.440.525,00	(959.475,00)	95,90
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.048.750,00	6.048.750,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.327.000,00	34.327.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.016.250,00	7.016.250,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.950.000,00	8.950.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,86
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.997.000,00	(3.000,00)	99,96
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180.500.000,00	177.887.650,00	(2.612.350,00)	98,55
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	153.670.000,00	153.670.000,00	-	100,00
	<b>S.6.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>30.067.500,00</b>	<b>(32.500,00)</b>	<b>99,89</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.000.000,00	6.967.500,00	(32.500,00)	99,54
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00
	<b>S.6.4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>1.017.390.000,00</b>	<b>1.004.941.663,00</b>	<b>(12.448.337,00)</b>	<b>98,78</b>
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	761.640.000,00	752.095.000,00	(9.545.000,00)	98,75
	2. Inverisasi Temuan Pengawasan	69.800.000,00	69.750.000,00	(50.000,00)	99,93

1	2	3	4	5	6
	3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	33.950.000,00	33.950.000,00	-	100,00
	4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	152.000.000,00	149.146.663,00	(2.853.337,00)	98,12
	<b>S.6.5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>46.330.000,00</b>	<b>46.290.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>99,91</b>
	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30.730.000,00	30.720.000,00	(10.000,00)	99,97
	2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	15.600.000,00	15.570.000,00	(30.000,00)	99,81
	<b>S.7. DINAS SYARI'AT ISLAM</b>				
	<b>S.7.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.036.307.397,00</b>	<b>2.024.044.049,00</b>	<b>(12.263.348,00)</b>	<b>99,40</b>
	<b>S.7.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.062.774.000,00</b>	<b>3.054.263.611,00</b>	<b>(8.510.389,00)</b>	<b>99,72</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000,00	20.921.412,00	(4.278.588,00)	83,02
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.499.749,00	(251,00)	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	131.000.000,00	129.990.000,00	(1.010.000,00)	99,23
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,94
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100.000.000,00	99.633.450,00	(366.550,00)	99,63
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.752.074.000,00	2.749.224.000,00	(2.850.000,00)	99,90
	<b>S.7.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>48.580.000,00</b>	<b>48.504.851,00</b>	<b>(75.149,00)</b>	<b>99,85</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.630.000,00	10.620.101,00	(9.899,00)	99,91
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.950.000,00	7.884.750,00	(65.250,00)	99,18

1	2	3	4	5	6
	<b>S.8. SEKRETARIAT KIP</b>				
	<b>S.8.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>729.060.474,00</b>	<b>682.030.197,00</b>	<b>(47.030.277,00)</b>	<b>93,55</b>
	<b>S.8.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>164.445.585,00</b>	<b>163.705.785,00</b>	<b>(739.800,00)</b>	<b>99,55</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.460.000,00	3.460.000,00	-	100,00
	3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.710.000,00	8.710.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.831.785,00	1.831.785,00	-	100,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.097.000,00	5.097.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	41.086.800,00	40.347.000,00	(739.800,00)	98,20
	10. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	83.360.000,00	83.360.000,00	-	100,00
	<b>S.8.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00
	<b>S.9. KECAMATAN LANGSA KOTA</b>				
	<b>S.9.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.590.223.616,00</b>	<b>1.512.300.298,00</b>	<b>(77.923.318,00)</b>	<b>95,10</b>
	<b>S.9.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.451.416.000,00</b>	<b>1.349.990.253,00</b>	<b>(101.425.747,00)</b>	<b>93,01</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.600.000,00	8.273.253,00	(8.326.747,00)	49,84
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	8.240.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	33.750.000,00	29.156.000,00	(4.594.000,00)	86,39
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.344.451.000,00	1.255.946.000,00	(88.505.000,00)	93,42
	<b>S.9.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>32.350.000,00</b>	<b>32.350.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.350.000,00	22.350.000,00	-	100,00
	<b>S.9.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00
	<b>S.10. KECAMATAN LANGSA BARAT</b>				
	<b>S.10.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.280.060.154,00</b>	<b>1.248.552.660,00</b>	<b>(31.507.494,00)</b>	<b>97,54</b>
	<b>S.10.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.546.122.000,00</b>	<b>1.178.390.279,00</b>	<b>(367.731.721,00)</b>	<b>76,22</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	6.945.543,00	(7.054.457,00)	49,61
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	3.999.910,00	(90,00)	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.202.722,00	17.199.600,00	(3.122,00)	99,98
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.498.900,00	(1.100,00)	99,97
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	8.240.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	30.200.000,00	30.017.000,00	(183.000,00)	99,39
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.437.757.000,00	1.346.948.000,00	(90.809.000,00)	93,68
	<b>S.10.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.150.000,00	21.150.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>S.10.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>40.810.000,00</b>	<b>(190.000,00)</b>	<b>99,54</b>
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	40.810.000,00	(190.000,00)	99,54
	<b>S.11. KECAMATAN LANGSA TIMUR</b>				
	<b>S.11.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.398.792.392,00</b>	<b>1.381.660.922,00</b>	<b>(17.131.470,00)</b>	<b>98,78</b>
	<b>S.11.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.558.059.000,00</b>	<b>1.509.680.488,00</b>	<b>(48.378.512,00)</b>	<b>96,89</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	2.748.000,00	(2.000,00)	99,93
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	5.353.369,00	(2.146.631,00)	71,38
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.500.000,00	8.499.950,00	(50,00)	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.318.189,00	15.318.050,00	(139,00)	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.130.000,00	18.130.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.438.811,00	5.438.811,00	-	100,00
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.999.800,00	(200,00)	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	38.400.000,00	37.943.572,00	(456.428,00)	98,81
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.442.022.000,00	1.396.248.936,00	(45.773.064,00)	96,83
	<b>S.11.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>35.950.000,00</b>	<b>35.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.950.000,00	25.950.000,00	-	100,00
	<b>S.11.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>S.12. KECAMATAN LANGSA LAMA</b>				
	<b>S.12.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.200.496.648,00</b>	<b>1.189.125.597,00</b>	<b>(11.371.051,00)</b>	<b>99,05</b>
	<b>S.11.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.670.484.580,00</b>	<b>1.651.836.110,00</b>	<b>(18.648.470,00)</b>	<b>98,88</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.178.530,00	13.674.060,00	(504.470,00)	96,44
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.579.420,00	28.579.420,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.950.000,00	20.950.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.439.630,00	7.439.630,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	17.240.000,00	17.240.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	34.095.000,00	34.095.000,00	-	100,00
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.529.802.000,00	1.511.658.000,00	(18.144.000,00)	98,81
	<b>S.12.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>29.195.000,00</b>	<b>28.895.000,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>98,97</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.695.000,00	20.395.000,00	(300.000,00)	98,55
	<b>S.12.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>S.13. KECAMATAN LANGSA BARÖ</b>				
	<b>S.13.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.191.075.463,00</b>	<b>1.151.258.769,00</b>	<b>(39.816.694,00)</b>	<b>96,66</b>
	<b>S.13.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.581.218.319,00</b>	<b>1.442.350.729,00</b>	<b>(138.867.590,00)</b>	<b>91,22</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000,00	14.468.289,00	(4.531.711,00)	76,15
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	5.876.600,00	(123.400,00)	97,94
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	4.067.500,00	(932.500,00)	81,35
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.961.719,00	17.957.850,00	(3.869,00)	99,98
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	3.701.890,00	(48.110,00)	98,72
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	8.240.000,00	8.240.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	21.392.600,00	21.292.600,00	(100.000,00)	99,53
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.477.674.000,00	1.344.546.000,00	(133.128.000,00)	90,99
	<b>S.13.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>29.537.800,00</b>	<b>(1.612.200,00)</b>	<b>94,82</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,00	4.887.800,00	(112.200,00)	97,76
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.150.000,00	19.650.000,00	(1.500.000,00)	92,91
	<b>S.13.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6
	<b>S.14. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU</b>				
	<b>S.14.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>731.388.289,00</b>	<b>704.635.030,00</b>	<b>(26.753.259,00)</b>	<b>96,34</b>
	<b>S.14.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>603.728.715,00</b>	<b>577.965.800,00</b>	<b>(25.762.915,00)</b>	<b>95,73</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	13.985.900,00	(19.014.100,00)	42,38
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.100.000,00	80.100.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.400.000,00	4.397.900,00	(2.100,00)	99,95
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.176.400,00	38.176.000,00	(400,00)	100,00
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.192.000,00	62.192.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	123.478.315,00	123.084.000,00	(394.315,00)	99,68
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	239.882.000,00	233.530.000,00	(6.352.000,00)	97,35
	<b>S.14.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>164.950.000,00</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>(8.350.000,00)</b>	<b>94,94</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	27.800.000,00	27.700.000,00	(100.000,00)	99,64
	3. Pengadaan Mebeleur	18.000.000,00	17.850.000,00	(150.000,00)	99,17
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000,00	22.000.000,00	(8.000.000,00)	73,33
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00
	<b>S.15. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
	<b>S.15.1. Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>6.859.326.588,00</b>	<b>6.719.154.724,00</b>	<b>(140.171.864,00)</b>	<b>97,96</b>
	<b>S.15.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.038.820.050,00</b>	<b>991.644.963,00</b>	<b>(47.175.087,00)</b>	<b>95,46</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00	41.870.481,00	(36.129.519,00)	53,68

1	2	3	4	5	6
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.778.400,00	4.720.600,00	(57.800,00)	98,79
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.222.650,00	88.221.938,00	(712,00)	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.380.000,00	22.305.000,00	(75.000,00)	99,66
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.600.000,00	164.580.000,00	(20.000,00)	99,99
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.945.000,00	(55.000,00)	99,08
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	305.400.000,00	298.940.444,00	(6.459.556,00)	97,88
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	310.039.000,00	305.661.500,00	(4.377.500,00)	98,59
	<b>S.15.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.550.000,00	11.550.000,00	-	100,00
	<b>S.15.4. Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00
	<b>S.15.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>369.800.000,00</b>	<b>304.800.000,00</b>	<b>(65.000.000,00)</b>	<b>82,42</b>
	1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	369.800.000,00	304.800.000,00	(65.000.000,00)	82,42
	<b>S.15.6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>792.500.000,00</b>	<b>764.350.000,00</b>	<b>(28.150.000,00)</b>	<b>96,45</b>
	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	376.300.000,00	348.150.000,00	(28.150.000,00)	92,52
	2. Seleksi Penerimaan Calon PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00
	3. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
	4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00
	5. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	163.700.000,00	163.700.000,00	-	100,00
	6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	66.500.000,00	66.500.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.072.227.931,00</b>	<b>88.892.182.409,56</b>	<b>(4.180.045.521,44)</b>	<b>95,51</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian masih dipandang belum optimal (penilaian objektivitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 7 (tujuh) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 18 unit

a.2. Sekretariat Daerah

- ❖ Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
- ❖ Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 unit

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	PKK Aktif	100%
b.	Posyandu aktif	100%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa adalah sebanyak 2 SKPD, yaitu :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, sementara itu Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya mencakup program koordinasi, pemberdayaan, serta pelantikan aparat pemerintah gampong/desa.

Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur organisasi Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Bagian Tata Pemerintahan.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan masyarakat pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 3.158.869.209,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.103.150.673,- atau sebesar 98,39%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,00%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>T.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
<b>T.1.</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
<b>T.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>1.393.791.283,00</b>	<b>1.370.514.915,00</b>	<b>(23.276.368,00)</b>	<b>98,33</b>
<b>T.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>463.815.000,00</b>	<b>452.550.832,00</b>	<b>(11.264.168,00)</b>	<b>97,57</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.500.000,00	14.426.382,00	(10.073.618,00)	58,88
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	34.999.250,00	(750,00)	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.800.000,00	17.800.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	103.300.000,00	102.150.200,00	(1.149.800,00)	98,89
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	208.315.000,00	208.275.000,00	(40.000,00)	99,98
<b>T.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>54.350.000,00</b>	<b>54.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00
<b>T.1.4.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>80.680.000,00</b>	<b>80.640.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>99,95</b>
	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	80.680.000,00	80.640.000,00	(40.000,00)	99,95

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>T.1.5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>43.980.000,00</b>	<b>43.980.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.980.000,00	43.980.000,00	-	100,00
	<b>T.1.6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>109.495.926,00</b>	<b>109.495.926,00</b>	-	<b>100,00</b>
	1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	55.470.000,00	55.470.000,00	-	100,00
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	54.025.926,00	54.025.926,00	-	100,00
	<b>T.2 SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	<b>T.2.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>492.550.000,00</b>	<b>486.161.000,00</b>	<b>(6.389.000,00)</b>	<b>98,70</b>
	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	492.550.000,00	486.161.000,00	(6.389.000,00)	98,70
	<b>T.2.2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>515.207.000,00</b>	<b>505.458.000,00</b>	<b>(9.749.000,00)</b>	<b>98,11</b>
	1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	179.048.000,00	179.048.000,00	-	100,00
	2. Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa	336.159.000,00	326.410.000,00	(9.749.000,00)	97,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.153.869.209,00</b>	<b>3.103.150.673,00</b>	<b>(50.718.536,00)</b>	<b>98,39</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan masyarakat masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## **21. Bidang Komunikasi dan Informatika**

### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (Dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a.1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
- b. Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 unit

a.2. Sekretariat Daerah

- a. Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
- b. Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 unit

Untuk selanjutnya, penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan Situs Informasi Pemerintah Kota Langsa dengan alamat [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), sementara itu [www.jdihkotalangsa.co.id](http://www.jdihkotalangsa.co.id) dengan penjabarannya berupa kumpulan Ran-Qanun dan Qanun Kota Langsa yang telah ditetapkan.

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 2 SKPD, yaitu :

- 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2. Sekretariat Daerah

SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang komunikasi dan Informatika, sementara itu

Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan peleksanaannya mencakup Program Pengembangan Informasi Media Massa.

Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur organisasi Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan adalah Bagian Hubungan Masyarakat.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja urusan wajib Bidang Komunikasi dan Media Massa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 57.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.125.000,- atau sebesar 99,99%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>S.</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>S.1.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>S.1.1.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>57.125.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>99,99</b>
	1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	57.130.000,00	57.125.000,00	(5.000,00)	99,99
<b>S.2.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
<b>S.1.2.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>759.131.500,00</b>	<b>753.821.800,00</b>	<b>(5.309.700,00)</b>	<b>99,30</b>
	1. Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan	709.131.500,00	708.821.800,00	(309.700,00)	99,96
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>57.125.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>99,99</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. Lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjangkaran aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan informatika masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.

- ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
    - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
  3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
    - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatoha teknis kepada Aparatur.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**22. Bidang Perpustakaan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Perpustakaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22,66%
b.	Pengunjung Perpustakaan	7,09%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.**

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.137.686.311,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.112.727.376,00,- atau 97,81%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,26%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
T.	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
T.1.	<b>KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DANDOKUMENTASI</b>				
T.1.1.	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>864.615.311,00</b>	<b>847.319.947,00</b>	<b>(17.295.364,00)</b>	<b>98,00</b>
T.1.2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>252.821.000,00</b>	<b>245.157.429,00</b>	<b>(7.663.571,00)</b>	<b>96,97</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	1.500.000,00	(180.000,00)	89,29
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.150.000,00	12.752.429,00	(7.397.571,00)	63,29
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.110.000,00	9.110.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.000,00	3.136.000,00	(1.000,00)	99,97
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	58.800.000,00	58.715.000,00	(85.000,00)	99,86
	11. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	108.444.000,00	108.444.000,00	-	100,00
T.1.3.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.137.686.311,00</b>	<b>1.112.727.376,00</b>	<b>(24.958.935,00)</b>	<b>97,81</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perpustakaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Perpustakaan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada Aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

### **23. Bidang Penataan Ruang**

#### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,26%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.**

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 97.305.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.305.400,00,- atau 100%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,02%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG PENATAAN RUANG  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
U.	<b>PENATAAN RUANG</b>				
U.1.	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	97.305.400,00	97.305.400,00	-	100,00
	<b>U.1.1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	97.305.400,00	97.305.400,00	-	100,00
	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang	97.305.400,00	97.305.400,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	97.305.400,00	97.305.400,00	-	100,00

**f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang masih dipandang belum optimal (penilaian objektivitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Penataan Ruang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada Aparatur

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**24. Bidang Ketahanan Pangan**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Regulasi ketahanan pangan	Tidak
b.	Ketersediaan pangan utama	29,40%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.**

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 193.062.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 175.750.000,00,- atau 91,03%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,04%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KETAHANAN PANGAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
V.	KETAHANAN PANGAN				
V.1.	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	193.062.000,00	175.750.000,00	(17.312.000,00)	91,03
V.1.1.	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	193.062.000,00	175.750.000,00	(17.312.000,00)	91,03
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193.062.000,00	175.750.000,00	(17.312.000,00)	91,03
	<b>JUMLAH</b>	<b>193.062.000,00</b>	<b>175.750.000,00</b>	<b>(17.312.000,00)</b>	<b>91,03</b>

**f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada Aparatur

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**25. Bidang Statistik**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bidang Statistik Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Statistik dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Buku "Kota dalam angka"	Ada
b.	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.**

Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib Bidang Statistik adalah Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laporan ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Statistik pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 85.827.500,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.827.500,00,- atau 100%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,02%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib Bidang Statistik berdasarkan Program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG STATISTIK  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W.	BIDANG STATISTIK				
	W.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85.827.500,00	85.827.500,00	-	100,00
	W.1.1. Program Pengembangan Data/Informasi	85.827.500,00	85.827.500,00	-	100,00
	1. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.827.500,00	85.827.500,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>85.827.500,00</b>	<b>85.827.500,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Statistik masih dipandang belum optimal (penilaian objektivitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Statistik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada Aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

## C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Bidang Pertanian

#### a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Pertanian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 4 (empat) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Kelutan, Perikanan dan Pertanian.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

#### b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pertanian dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,07 Ton/Ha
b.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	11,48%

#### c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 891.359.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 958.064.800,- atau sebesar 97,63%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,22%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A.</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>				
	<b>A.1. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN</b>				
	<b>S.1.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>193.062.000,00</b>	<b>175.750.000,00</b>	<b>(17.312.000,00)</b>	<b>91,03</b>
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193.062.000,00	175.750.000,00	(17.312.000,00)	91,03
	<b>S.1.2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>348.297.400,00</b>	<b>342.314.800,00</b>	<b>(5.982.600,00)</b>	<b>98,28</b>
	1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	348.297.400,00	342.314.800,00	(5.982.600,00)	98,28
	<b>S.1.3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pembibitan dan Perawatan Ternak	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00
	<b>S.1.4. Program Peningkatan Produksi Peternakan</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	335.000.000,00	335.000.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>981.359.400,00</b>	<b>958.064.800,00</b>	<b>(23.294.600,00)</b>	<b>97,63</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pertanian masih dipandang belum optimal (penilaian objektivitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis kepada Aparatur.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

**2. Bidang Pariwisata**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pariwisata dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kunjungan wisata	36.829 orang
b.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,08%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 12.904.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau sebesar 99,26%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,003%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pariwisata berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
B.	<b>BIDANG PARIWISATA</b>				
B.1.	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>				
B.1.1.	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>(96.000,00)</b>	<b>99,26</b>
	1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	13.000.000,00	12.904.000,00	(96.000,00)	99,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>(96.000,00)</b>	<b>99,26</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Pariwisata masih dipandang belum optimal (penilaian objektivitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis kepada Aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

### **3. Bidang Keluatan dan Perikanan**

#### **a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Kelutan, Perikanan dan Pertanian.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

**b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kelautan dan Perikanan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Pruduksi Perikanan	72,46%
b.	Konsumsi Ikan	90,00%

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Keluatan, Perikanan dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 7.243.780.637,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.173.217.341,- atau sebesar 99,03%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,68%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja  
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan  
Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>C.</b>	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
<b>C.1.</b>	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN</b>				
<b>C.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>4.069.067.637,00</b>	<b>4.016.164.745,00</b>	<b>(52.902.892,00)</b>	<b>98,70</b>
<b>C.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>707.880.000,00</b>	<b>694.419.775,00</b>	<b>(13.460.225,00)</b>	<b>98,10</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	35.860.151,00	(10.139.849,00)	77,96
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	4.999.361,00	(639,00)	99,99
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	4.940.259,00	(59.741,00)	98,81
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	24.999.180,00	(820,00)	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.994.300,00	(5.700,00)	99,97
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.996.905,00	(3.095,00)	99,94
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.164.619,00	(835.381,00)	83,29
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	191.600.000,00	191.600.000,00	-	100,00
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	383.280.000,00	380.865.000,00	(2.415.000,00)	99,37
<b>C.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>82.899.821,00</b>	<b>(200.179,00)</b>	<b>99,76</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.000.000,00	3.999.821,00	(179,00)	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	59.100.000,00	58.900.000,00	(200.000,00)	99,66

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>C.1.4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>1.560.000.000,00</b>	<b>1.556.000.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>99,74</b>
	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.560.000.000,00	1.556.000.000,00	(4.000.000,00)	99,74
	<b>C.1.5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>823.733.000,00</b>	<b>823.733.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan	823.733.000,00	823.733.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.243.780.637,00</b>	<b>7.173.217.341,00</b>	<b>(70.563.296,00)</b>	<b>99,03</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis kepada Aparatur.

**i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

**4. Bidang Industri**

**a. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Industri Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

## **b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Industri dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,06%
b.	Pertumbuhan Industri	21,13%

## **c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Industri adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

## **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

## **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Industri dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.

4.544.953.205,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.475.523.307,- atau sebesar 98,56%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,05%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Industri berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG INDUSTRI  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>D.</b>	<b>BIDANG INDUSTRI</b>				
<b>D.1.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>				
<b>D.1.1.</b>	<b>Non Program (Belanja Tak Langsung)</b>	<b>2.577.642.352,00</b>	<b>2.551.413.126,00</b>	<b>(26.229.226,00)</b>	<b>98,98</b>
<b>D.1.2.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>474.720.853,00</b>	<b>445.430.181,00</b>	<b>(29.290.672,00)</b>	<b>93,83</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.000.000,00	29.357.231,00	(14.642.769,00)	66,72
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.048.853,00	53.048.850,00	(3,00)	100,00
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	138.000.000,00	123.352.100,00	(14.647.900,00)	89,39
	12. Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran	175.372.000,00	175.372.000,00	-	100,00
<b>D.1.3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.319.250.000,00</b>	<b>1.310.340.000,00</b>	<b>(8.910.000,00)</b>	<b>99,32</b>
	1. Pembangunan Gedung Kantor	1.290.000.000,00	1.281.090.000,00	(8.910.000,00)	99,31
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.250.000,00	26.250.000,00	-	100,00
<b>D.1.4.</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>173.340.000,00</b>	<b>172.340.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>99,42</b>
	1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	64.860.000,00	63.860.000,00	(1.000.000,00)	98,46
	2. Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	108.480.000,00	108.480.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.544.953.205,00</b>	<b>4.479.523.307,00</b>	<b>(65.429.898,00)</b>	<b>98,56</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Industri dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Bidang Industri masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Industri dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis kepada Aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

## 5. Bidang Perdagangan

### a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 5 (lima) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perdagangan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,79%
b.	Ekspor Bersih Perdagangan	Nihil

### c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Perdagangan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 264.891.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 253.338.155,- atau sebesar 95,64%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,059%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Industri berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>E.</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>				
<b>E.1.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</b>				
<b>E.1.1.</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>91.361.365,00</b>	<b>91.338.605,00</b>	<b>(22.760,00)</b>	<b>99,98</b>
1.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	91.361.365,00	91.338.605,00	(22.760,00)	99,98
<b>E.1.2.</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>109.429.723,00</b>	<b>97.899.550,00</b>	<b>(11.530.173,00)</b>	<b>89,46</b>
1.	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	30.884.723,00	25.034.550,00	(5.850.173,00)	81,06
2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	78.545.000,00	72.865.000,00	(5.680.000,00)	92,77
<b>E.1.3.</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>	<b>64.100.000,00</b>	<b>64.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	50.100.000,00	50.100.000,00	-	100,00
2.	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>264.891.088,00</b>	<b>253.338.155,00</b>	<b>(11.552.933,00)</b>	<b>95,64</b>

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Perdagangan Perdagangan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

## **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatoha teknis kepada Aparatur.

## **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

## **6. Bidang Kehutanan**

### **j. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi anggaran.

### **k. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kehutanan dapat kami uraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
a.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,01%
b.	Kerusakan kawasan hutan	32,67

### **l. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pilihan Bidang Kehutanan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.

**m. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.

**n. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Kehutanan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.288.188.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.186.705.982,- atau sebesar 92,12%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,28%.

Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang Industri berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH BERKURANG (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>F.</b>	<b>BIDANG KEHUTANAN</b>				
<b>F.1.</b>	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN</b>				
<b>F.1.1.</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>844.531.600,00</b>	<b>844.187.000,00</b>	<b>(344.600,00)</b>	<b>99,96</b>
	1. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	844.531.600,00	844.187.000,00	(344.600,00)	99,96
<b>F.1.2.</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>443.656.400,00</b>	<b>342.518.982,00</b>	<b>(101.137.418,00)</b>	<b>77,20</b>
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Daya Hutan	443.656.400,00	342.518.982,00	(101.137.418,00)	77,20
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.288.188.000,00</b>	<b>1.186.705.982,00</b>	<b>(101.482.018,00)</b>	<b>92,12</b>

**o. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan**

Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Kehutanan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.

RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.

**p. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan Kehutanan masih dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah Aparatur.

#### **q. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang Kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan Program dan kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi terhadap SKPD terkait
  
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
  - ❖ Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin belajar serta peningkatan pelatihan pelatoha teknis kepada Aparatur.

#### **i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

## **BAB IV**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan yang diterima**

Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kota Langsa pada tahun anggaran 2012 sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

##### **1. Kementerian Dalam Negeri.**

<b>Darasn Hukum</b>	: Kepres Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL No. STAP-010.06.06-0/ AG/2011 dan DNA No. 06/010.6/20112
<b>Program</b>	: Bina Pembangunan Daerah
<b>Kegiatan</b>	: -
<b>Anggaran</b>	: Pagu : Rp. 2.000.000.000,- Realisasi : Rp. 1.953.816.350,-
<b>SKPK Pelaksana</b>	: Sekretariat Daerah Kota Langsa.
<b>Jumlah Pegawai</b>	: (Terlampir pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai)
<b>Sarana dan Prasarana</b>	: Memadai
<b>Permasalahan</b>	: - Keterbatasan SDM Petugas dalam rangka monitoring dan evaluasi. - Keterbatasan pembiayaan terhadap Program dan kegiatan terkait.
<b>Solusi</b>	: - Sosialisasi internal terhadap petugas - Mencari Alternatif sumber biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan

## 2. Kementerian Kesehatan.

<b>Darasn Hukum</b>	: Kepres Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL No. STAP-010.06.06-0/ AG/2011 dan DNA No. 06/010.6/20112
<b>Program</b>	: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
<b>Kegiatan</b>	: -
<b>Anggaran</b>	: Pagu : Rp. 491.425.000,- Realisasi : Rp. 484.225.000,-
<b>SKPK Pelaksana</b>	: Dinas Kesehatan Kota Langsa
<b>Jumlah Pegawai</b>	: (Terlampir pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai)
<b>Sarana dan Prasarana</b>	: Memadai
<b>Permasalahan</b>	: - Keterbatasan SDM Petugas dalam rangka monitoring dan evaluasi. - Keterbatasan pembiayaan terhadap Program dan kegiatan terkait.
<b>Solusi</b>	: - Sosialisasi internal terhadap petugas - Mencari Alternatif sumber biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan

## 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

<b>Darasn Hukum</b>	: Kepres Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL No. STAP-010.06.06-0/ AG/2011 dan DNA No. 06/010.6/20112
<b>Program</b>	: Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja.

<b>Kegiatan</b>	: -
<b>Anggaran</b>	: Pagu : Rp. 524.050.000,- Realisasi : Rp. 517.010.000,-
<b>SKPK Pelaksana</b>	: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kota Langsa
<b>Jumlah Pegawai</b>	: (Terlampir pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai)
<b>Sarana dan Prasarana</b>	: Memadai
<b>Permasalahan</b>	: - Keterbatasan SDM Petugas dalam rangka monitoring dan evaluasi. - Keterbatasan pembiayaan terhadap Program dan kegiatan terkait.
<b>Solusi</b>	: - Sosialisasi internal terhadap petugas - Mencari Alternatif sumber biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan

## **BAB V**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasitas serta kinerja terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam konteks tersebut, bentuk kerjasama antar daerah yang diselenggarakan pemerintah kota Langsa tahun 2012 pada umumnya bersifat peningkatan SDM aparatur serta sinkronisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.**

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan aparatur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mereka emban. Adapun daerah tujuan dimaksud adalah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

##### **2. Pendidikan dan Pelatihan**

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur diseluruh bidang pembangunan dalam konteks otonomi daerah pada masa yang akan datang

## **B. Kejasama daerah dengan pihak ketiga**

Dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektifitas, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang pendanaannya dibebankan kepada belanja daerah. Adapun bentuk kegiatan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa dalam merumuskan rancangan APBD Langsa dengan mitra pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBD Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 1.290.719.101,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.251.959.850,00

### **2. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah**

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa dalam merumuskan rancangan APBD Langsa dengan mitra pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBD Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 255.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 188.054.850,00

### **3. Penyusunan laporan aset/barang milik daerah**

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa dalam penyusunan laporan aset/barang daerah dengan mitra pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini

diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 627.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 624.828.300,00

#### **4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa dalam merumuskan rancangan pertanggung jawaban APBK Langsa dengan mitra pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 541.389.000,00

#### **5. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan kerja.**

Kegiatan ini dimaksud untuk membahas berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, SKPD penyelenggara adalah Dianas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa dengan mitra pelaksana adalah LSM dan Ormas. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 81.493.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.493.920,00

#### **6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2013.**

Kegiatan ini dimaksud untuk merumuskan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2013,

SKPD penyelenggara adalah BAPPEDA Kota Langsa dengan mitra pelaksana adalah Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 115.000.000,00.

## **7. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa.**

Kegiatan ini dimaksud untuk merumuskan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), SKPD penyelenggara adalah BAPPEDA Kota Langsa dengan mitra pelaksana adalah Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,00

### **C. Koordinasi dengan instansi vertikal**

Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah mengingat keterbatasan otorisasi bidang kewenangan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Langsa melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat saling mendukung.

oleh karena itu intensitas kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal perlu ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan program dan kebijakan pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Koordinasi forum-forum diskusi politik**

Kegiatan ini dimaksud untuk mendeteksi gangguan stabilitas nasional, SKPD penyelenggara adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa dengan mitra instansi vertikal adalah Polres Langsa dan Kodim 0104 Aceh Timur. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 42.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.065.000,00

### **2. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kegiatan ini dimaksud untuk penyusunan buku PDRB Kota Langsa, dengan mitra instansi veretikal adalah BPS Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 85.827.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.827.500,00

### **3. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)**

Kegiatan ini dimaksud untuk penyusunan buku IPM Kota Langsa, dengan mitra instansi veretikal adalah BPS Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.000.000,00

#### **4. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Kegiatan ini dimaksud untuk pengembangan data dan informasi, dengan mitra instansi vertikal adalah BPS Kota Langsa. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 130.827.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 130.827.500,00

#### **D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini sangat mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana-bencana yang tak terduga. tanggap bencana merupakan solusi cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi tersebut. Disamping perubahan iklim, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan pencegahan bencana. Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah khususnya Kota Langsa telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Kota Langsa mengambil kebijakan untuk melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, mengingat Kota Langsa yang terletak di pulau Sumatera yang secara geografis rawan terhadap bencana alam. Adapun kebijakan pencegahan tersebut yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 628.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 627.672.500,00
2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00

## **E. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat untuk bekerjanya sistem pemerintahan, hal demikian ditandai dengan adanya iklim yang kondusif. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik sosial dan model demonstrasi yang cenderung anarkis dan tak terkendali. Masyarakat Kota Langsa merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari suku etnis dan pendatang sehingga potensi konflik sangat besar kemungkinannya.

Kondisi ketertiban dan keamanan di Kota Langsa tahun 2011 secara umum relatif kondusif. Gangguan atau konflik yang terjadi yang berbasis SARA, Narkisme, Sapatisme atau lainnya yang sifatnya dapat memicu konflik lainnya dapat dikatakan tidak terjadi di Kota Langsa, dan kalupun ada yang mengarah ke konflik tersebut dapat diatasi bersama oleh pihak TNI, POLRI dan Pemerintah Kota Langsa.

Adapun Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**

SKPD Penyelenggara : Badan Kesbanpol dan Linmas  
Plafon anggaran : Rp. 37.870.000,-  
Realisasi anggaran : Rp. 37.870.000,-  
Sumber dana : APBK Kota Langsa

### **2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**

SKPD Penyelenggara : Satpol PP dan WH Kota Langsa  
Plafon anggaran : Rp. 1210800000,-  
Realisasi anggaran : Rp. 1.198.881.688,-  
Sumber dana : APBK Kota Langsa

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Langsa tahun 2012 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Langsa dalam berbagai bidang yang dijabarkan dalam sektor-sektor kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kota Langsa merupakan prioritas dalam pembangunan daerah yang menitik beratkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak pula kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Langsa sehingga diharapkan untuk pembangunan ke depan akan lebih berhasil.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, Pemerintah Kota Langsa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2012, dan sekaligus ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi didalam penyusunan laporan ini.

## LAMPIRAN I :

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2012**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH	PENDIDIKAN										PEJABAT				Tenaga Fungsional	KET
		I	II	III	IV		S-3	S-2	S-1	DIPLOMA				SMA/ Sederajad	SLTP/ Sederajad	SD/ Sederajad	STRUKTURAL/ESELON					
										I	II	III	IV				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Sekretariat Daerah	1	55	68	34	158	0	21	73	0	0	6	4	53	1	0	0	7	9	26	0	
2	Sekretariat DPRK	0	22	20	6	48	0	0	23	0	0	4	0	21	0	0	0	1	4	10	0	
3	Inspektorat	0	8	34	9	51	0	6	33	0	0	3	0	9	0	0	0	1	5	3	17	
4	Dinas Kesehatan	0	12	57	9	78	0	3	39	1	0	20	2	13	0	0	0	1	4	12	0	
5	Dinas Pendidikan	0	24	42	61	127	0	5	89	0	3	3	0	27	0	0	0	1	4	11	56	
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0	19	22	6	47	0	4	14	0	0	10	0	19	0	0	0	1	5	13	1	
7	Dinas Pekerjaan Umum	1	38	46	5	90	0	2	40	0	0	9	0	37	1	1	0	0	6	14	0	
8	Dinas Kependudukan dan Capil	0	7	16	5	28	0	1	16	0	0	2	0	9	0	0	0	1	3	8	0	
9	Dinas Syariat Islam	0	9	28	4	41	0	2	25	0	0	3	0	11	0	0	0	1	4	16	0	
10	Dinas Perindag, Koperasi dan UKM	1	17	29	5	52	0	3	29	0	0	8	0	11	1	0	0	1	6	14	0	
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	0	21	67	7	95	0	4	59	2	0	4	4	22	0	0	0	2	6	19	26	
12	Dinas Sosial, Naker dan Mobilitas Penduduk	1	18	28	4	51	0	1	26	0	0	2	0	22	0	0	0	1	6	19	0	
13	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	40	57	4	102	0	3	53	0	0	12	0	33	1	0	0	1	4	15	0	
14	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	0	11	24	5	40	0	1	22	0	0	1	0	16	0	0	0	1	6	14	0	
15	Rumah Sakit Umum Daerah	13	192	289	50	544	0	12	123	2	0	260	2	132	11	2	0	1	8	12	332	
16	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	0	11	24	6	41	0	4	22	0	0	1	0	13	1	0	0	1	4	11	0	
17	Badan Kepegawai, Pendidikan dan Pelatihan	0	15	28	3	46	0	4	27	0	0	7	0	8	0	0	0	1	5	8	0	
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1	7	14	5	27	0	4	12	0	0	1	0	8	0	2	0	1	5	11	0	
19	Badan Kesbangpol dan Linmas	1	14	17	5	37	0	2	15	0	0	5	0	14	1	0	0	1	6	10	0	
20	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	0	17	21	3	41	0	0	20	0	0	3	0	18	0	0	0	1	1	10	6	
21	Badan LH, Kebersihan dan Pertamanan	0	7	20	5	32	0	2	20	0	1	1	0	8	0	0	0	1	5	10	0	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	13	18	1	32	0	2	16	0	0	0	0	14	0	0	0	1	4	9	0	
23	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0	8	12	0	20	0	0	12	0	0	1	0	7	0	0	0	0	1	4	0	
24	Kantor Satpol PP dan WH	0	20	8	0	28	0	1	7	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	
25	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0	9	10	0	19	0	1	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	4	0	
26	Sekretariat KORPRI	0	1	3	1	5	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
27	Sekretariat KIP	0	8	9	1	18	0	0	10	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	4	0	
28	Sekretariat MPU	0	1	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
29	Kecamatan Langsa Barat	2	20	11	1	34	0	0	10	0	0	1	1	20	1	1	0	0	2	8	0	
30	Kecamatan Langsa Timur	2	19	12	1	34	0	2	8	0	0	2	1	19	1	1	0	0	2	8	0	
31	Kecamatan Langsa Kota	1	11	9	1	22	0	1	5	0	0	1	1	13	0	1	0	0	2	5	0	
32	Kecamatan Langsa Lama	0	18	10	1	29	0	2	9	0	0	2	0	16	0	0	0	0	2	7	0	
33	Kecamatan Langsa Baru	0	14	12	1	27	0	2	9	0	0	1	0	15	0	0	0	0	2	7	0	
34	Puskesmas Langsa Kota	0	62	58	1	121	0	0	21	10	0	64	3	23	0	0	0	0	0	0	0	
35	Puskesmas Langsa Timur	2	45	34	2	83	0	1	12	13	0	45	0	10	1	1	0	0	0	0	0	
36	Puskesmas Langsa Baru	0	49	73	3	125	0	0	23	14	0	66	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
37	Puskesmas Langsa Barat	1	29	40	5	75	0	1	12	13	0	35	0	13	1	0	0	0	0	0	0	
38	Puskesmas Langsa Lama	0	40	41	4	85	0	2	13	10	0	44	1	15	0	0	0	0	0	0	0	
39	TK	0	28	15	27	70	0	0	19	1	21	1	0	28	0	0	0	0	0	0	78	
40	SD	1	134	229	507	871	0	2	398	0	310	8	0	147	0	6	0	0	0	0	968	
41	SLTP	4	53	256	226	539	0	3	384	16	18	58	0	54	3	3	0	0	0	0	608	
42	SMU	0	15	188	104	307	0	12	263	0	0	13	1	18	0	0	0	0	0	0	359	
43	SMK	0	26	164	110	300	0	5	241	0	0	22	11	19	0	2	0	0	0	2	362	
44	DPB	1	6	5	11	23	0	4	11	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>1193</b>	<b>2169</b>	<b>1250</b>	<b>4646</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>2276</b>	<b>83</b>	<b>353</b>	<b>733</b>	<b>31</b>	<b>1000</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>124</b>	<b>329</b>	<b>2813</b>	

## LAMPIRAN II.1 :

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012

## KOTA LANGSA

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA IMB	Ada/tidak	ada	ada	Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
			2	Rasio Rumah ber IMB	% Jumlah Rumah ber IMB	Jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2012	Unit	1599	69,52	Sumber Data: Dinas PU
						Jumlah seluruh rumah s.d akhir tahun 2012	Unit	2300		
		3	Keberadaan PERDA RTRW	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA RTRW	Ada/tidak	ada	ada	Qanun Nomor: 5 Tahun 2012 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032	
		Peraturan ttg Kependudukan	4	Pengurusan e - KTP	Jumlah penduduk yang telah terekam dalam e - KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam e - KTP	org	82860	44,51	Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						- Jumlah penduduk yang wajib ber KTP	jiwa	186142		
		5	Biaya KTP	Biaya Pengurusan KTP dalam PERDA	Perda	Rp /KTP	7500	7500,00	Dasar hukum : Qanun Kota Langsa No.01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk (Personil Satpol PP Per 10.000 Penduduk)	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2012 dibagi jumlah penduduk akhir tahun 2012 x 10.000 penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2012	orang	27	1,41	Sumber Data: Kantor Satpol PP dan WH
						Penduduk pada akhir tahun 2012	Jiwa	191823		
		7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	ada/tidak ada PERDA	ada/tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS	Ada/tidak	ada	ada	Qanun Kota Langsa No 14 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima	
8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota Kabupaten	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Ada/ tidak	ada	ada	Qanun No 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kota Langsa			
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian LPPD 2012 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	tidak	Tidak	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal ..... 2013 sesuai surat pengantar Nomor ..... Tanggal ..... 2013
			10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2012 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	tidak	Tidak	Bukti Pengiriman: Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal ..... 2013 sesuai surat pengantar Nomor .... tanggal ..... 2013

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN		
								Elemen Data	Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2012 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	tidak	Tidak	Bukti Pengiriman Laporan Kinerja tahun 2012. disampaikan pada tanggal ..... 2013 sesuai surat pengantar No: ..... tanggal ..... 2013		
			12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang telah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND	Urusan yang telah diterapkan	Jumlah	6	6			
							1. Urusan Pendidikan	sudah/belum	sudah			
							2. Urusan Kesehatan	sudah/belum	sudah			
							3. Urusan Lingkungan Hidup	sudah/belum	sudah			
							4. Urusan Sosial	sudah/belum	sudah			
							5. Urusan Pemberdayaan Perempuan	sudah/belum	sudah			
							6. Urusan BKKBN	sudah/belum	sudah			
				Kerjasama antar daerah Kab/kota	13	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2011	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2012	Jumlah	0	0	No & tgl MoU diisi pada kolom 9 elemen data dan ttg diisi pada kolom 11 keterangan
								1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2012	No&tgl MOU			ttg .....
								2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2012	No&tgl MOU			ttg .....
								3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2012	No&tgl MOU			ttg .....
					4. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2012	No&tgl MOU			ttg .....			
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional	Program	11	100,00	1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; 11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik.		
						Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	Program	11				
				Kewenangan	15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007)x 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2012	Urusan	25	100,00	Jumlah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kota
				Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2012	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2012	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2012	tgl penetapan	tidak	Tidak	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ..... Tahun ..... tentang ..... APBD 2012. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2011).

NO	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN				
							Elemen Data	Capaian Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			17	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak	Ada	ada	Qanun Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah			
			18	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012	Rp	296.716.436.204	65,44459955				
						1. Urusan Pendidikan	Rp	167.501.309.210					
						2. Urusan Kesehatan	Rp	79.545.156.178					
						3. Urusan Lingkungan Hidup	Rp	15.176.111.578					
						4. Urusan PU	Rp	20.933.054.076					
						5. Urusan Sosial	Rp	4.576.016.234					
						6. Urusan Tenaga Kerja	Rp	81.493.920					
						7. Urusan Koperasi	Rp	35.080.000					
						8. Urusan Satpol PP	Rp	6.153.574.905					
						9. Urusan Kependudukan & Capil	Rp	2.714.640.103					
						Total Belanja APBD	Rp	453.385.670.077					
						19	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100 %	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan	Rp	247.046.465.388	54,49	
									1. Urusan Pendidikan	Rp	167.501.309.210		
									2. Urusan Kesehatan	Rp	79.545.156.178		
				Pelayanan publik		20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak	tidak	tidak	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
				Kepegawaian		21	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Kabupaten akhir tahun 2012	orang	4646	2,42	
			Penduduk pada akhir tahun 2012						Jiwa	191823			
						22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1 SAPK	Ada/tidak	ada	ada	
									2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1 SIMDA	Ada/tidak	ada		
				Kelembagaan		23	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD	Unit	38	38	
									1. Bagian (setda)	Unit	9		
									2. Dinas	Unit	11		
	3. Badan	Unit	7										
	4. Kantor	Unit	3										

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5. Rumah Sakit	Unit	1		
						6. Lembaga Teknis lainnya	Unit	2		
						7. Kecamatan / Distrik	Unit	5		
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	Jumlah perda tahun 2012	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2012	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2012	Perda	7	7	sebutkan Nomor dan tgl perda tahun 2012 dikolom 9 elemen data dan ttg pada kolom 11 keterangan.
						1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012 #1	No&tgl perda	No. 1, Tanggal 23 Februari		ttg Retribusi Jasa Umum
						2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012 #2	No&tgl perda	No. 2, Tanggal 23 Februari		ttg Retribusi Jasa Usaha
						3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012#3	No&tgl perda	No. 3, Tanggal 23 Februari		ttg Retribusi Perijinan Tertentu
						4. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012 #4	No&tgl perda	No. 4, Tanggal 23 Februari		ttg Pajak Daerah
						5. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012#5	No&tgl perda	No. 5, Tanggal 23 Februari		ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032
						6. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012 #6	No&tgl perda	No. 6, Tanggal 23 Februari		ttg APBK Langsa
						7. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2012 #7	No&tgl perda	No. 7, Tanggal 23 Februari		ttg Perubahan APBK Langsa
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	25	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2012	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2012	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012	Raperda	7	87,50	
						RAPERDA yang diusulkan tahun 2012	Raperda	8		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2012	Kep	12	100,00	
						Keputusan DPRD dalam tahun 2012	Kep	12		
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	tindaklanjuti keputusan KDH	27	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2012 x 100%	Keputusan Walikota tahun 2012 yang ditindaklanjuti	Kep	510	100,00	
						Keputusan Walikota tahun 2012	Kep	510		
		tindaklanjuti Peraturan KDH	28	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah peraturan Bupati dalam tahun 2012 x 100%	Peraturan Walikota tahun 2012 yang ditindaklanjuti	PerWal	27	100,00	
						Peraturan Walikota tahun 2012	PerWal	27		
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	PERDA yang dibatalkan	Perda	0	0,00	Sebutkan nama Perda yang dibatalkan tersebut: 1....., 2....., 3.....,
						PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda	7		

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN									
								Elemen Data	Capaian Kinerja										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA / Perwal	ada/tidak ada PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/tidak	tidak	tidak	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (konsultasi publik)									
											Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan PerBup	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi		tidak	Perwal No ..... Tahun .....
															2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2	Media informasi			Perwal No ..... Tahun .....
															3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3	Media informasi			Perwal No ..... Tahun .....
4. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi			Perwal No ..... Tahun .....															
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2012	Rp	392.199.545.112	99,48										
						Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2012	Rp	394.244.876.058											
						Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja Langsung (Realisasi) thn 2012	Rp	150.002.747.013	44,47						
										DAU Tahun 2012	Rp	337.337.339.000							
	Alokasi belanja pada APBD	34	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total Belanja langsung tahun 2012 (realisasi)	Rp	150.002.747.013	35,17											
					Total Belanja APBD tahun 2012 (realisasi)	Rp	426.537.978.665												
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012	Rp	16.670.272.466	3,58										
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2012	Rp	466.039.334.184											
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011	WTP, WDP, TMP, TW	WDP	#VALUE!										
						Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010	WTP, WDP, TMP, TW	WDP											
		Besaran SILPA	37	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2012	Rp	823.246.497	0,18										
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2012	Rp	466.039.334.184											
		Realisasi belanja	38	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2012	Rp	426.537.978.665	94,08										
						Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2012	Rp	453.385.670.077											

NO	ASPEK	FOKUS		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan Inspektorat Daerah	39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2011 Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2012	Temuan Temuan	107 128	83,59	
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2012 dibagi dengan potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2012 Potensi PAD Pada tahun 2012	Rp Rp	16.670.272.466 35.464.721.911	47,01	
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	(PAD 2012 - PAD 2011) : PAD 2011 x 100%	Total PAD pada tahun 2012 Total PAD pada tahun 2011	Rp Rp	35.464.721.911 36.310.437.019	-2,33	
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2012.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2012	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2012	Penghargaan	0	0	sebutkan Nomor dan tgl penghargaan yang diterima tahun 2012 dikolom 9 elemen data dan ttg pada kolom 11 keterangan.
							#1.			ttg .....
							#2.			ttg .....
							#3.			ttg .....
							#4.			ttg .....
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/tidak	tidak	tidak	
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2012	Persetujuan Ijin Investasi pada Tahun 2012	Izin	0	0	

## LAMPIRAN II.2

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENDIDIKAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	5	100	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	5		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	21	tdi	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan			
		Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	1	ada	
						1. Jabatan Fungsional #1	Pengawas			
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	1974	42,49	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	21	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		tdi	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak			
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	166.213.622.899	36,66	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	18.027.398.830	0,01	
						Total Belanja SKPD	Rp	164.299.869.752.640		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	340.588.439	12,67	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.687.592.134		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	340.588.439	0,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	164.299.869.752.640		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak		tdi	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp			tdi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak				
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak				
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak				
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	18	100	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	18		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	79	1,70	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	3	17,65	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	55,56	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	9		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	83,33	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	45,45	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	32.386.091.057	7,14	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	3.466.680.000	97,65	
						Total Belanja SKPD	Rp	3.550.129.270		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	269.907.000	23,20	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.163.185.910		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	269.907.000	0,91	
						Total Belanja SKPD	Rp	29.772.113.139		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	1 1	100,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								9	10		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
					Jumlah program nasional (RKP)	program					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0		
						SOP #1		ada			
						SOP #2		ada			
						SOP #3		ada			
			SOP #4		ada						
			SOP #5		ada						
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	21	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	21			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1		22			
						2. Jabatan Fungsional #2		17			
						3. Jabatan Fungsional #3		240			
4. Jabatan Fungsional #4		149									
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	532	11,45		
						Jumlah PNS Kota	orang	4646			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	15	71,43		
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21									

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	16	76,19	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	66,67	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	9		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	47.159.065.121	10,40	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	23.083.299.873		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	211.200.000	14,06	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.502.361.039		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	211200000	447,85	
						Total Belanja SKPD	Rp	47159065		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 95.199.328.024	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak				
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi	
					Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1		ada		
						SOP #2		ada		
						SOP #3		ada		
			SOP #4		ada					
			SOP #5		ada					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	25	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	25		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
	3. Jabatan Fungsional #3									
	4. Jabatan Fungsional #4									
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	88	1,89	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	21	84,00	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	18	72,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	7	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	7		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	9	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	9		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	9	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	9		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	21.008.054.076	4,63	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	13.752.304.000	65,46	
						Total Belanja SKPD	Rp	21.008.054.076		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	93.300.000	13,05	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	714.800.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	93300000	0,44	
						Total Belanja SKPD	Rp	21.008.054.076		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 294.116.505.061	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak				
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERUMAHAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	100	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	1		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5	
						SOP #1		-		
						SOP #2		-		
						SOP #3		-		
			SOP #4		-					
			SOP #5		-					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	92,86	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	14		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	4	ada	
						1. Jabatan Fungsional #1		-		
						2. Jabatan Fungsional #2		-		
						3. Jabatan Fungsional #3		-		
			4. Jabatan Fungsional #4		-					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	32	0,69	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	14	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	92,86	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	7.680.705.142	1,69	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	565.550.000	100,00	
						Total Belanja SKPD	Rp	565.550.000		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	235.200.000	14,17	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.659.510.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	235200000	41,59	
						Total Belanja SKPD	Rp	565550000		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 496.999.000	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
2. Urusan Penataan Ruang
3. Urusan Statistik

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD							
								Urusan 1 (RENBANG)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Statistik)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	100	1	25	1	33,33333333		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	1		4		3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0	0	
						SOP #1									
						SOP #2									
						SOP #3									
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00		tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1							
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	100,00	3	100,00	3	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	11		3		3			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		tidak	0	tidak	0	tidak		tidak
						1. Jabatan Fungsional #1		-							
						2. Jabatan Fungsional #2		-							
						3. Jabatan Fungsional #3		-							
4. Jabatan Fungsional #4		-													

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD								
								Urusan 1 (RENBANG)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Statistik)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	24	0,52	9	0,19	8	0,17			
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Diklatpim	orang	11	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11		3		3				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	11	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	11		3		3				
			5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
									-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
-RKA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD			Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	30,00	3	75,00	3	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	10		4		3				
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD			Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	10	100,00	3	100,00	2	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	10		3		2				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	8	100,00	1	100,00	1	100,00			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8		1		1				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran			13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.496.878.234	0,99	97.305.400	0,02	85.827.500	0,02	
								Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	33.000.000	0,73	0	0,00	0	0,00			
						Total Belanja SKPD	Rp	4.496.878.234		97.305.400		85.827.500				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 1 (RENBANG)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Penataan Ruang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Statistik)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	57.440.500	5,74	0	0,00	0	tdi
							Rp	1.000.299.136		65.305.400		0	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan S	Rp	57.440.500	1,28	0	0,00	0	0,00
							Rp	4.496.878.234		97.305.400		85.827.500	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
								- Neraca	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
								- LRA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada
- CAlk	ada/tidak	ada	ada	ada	ada								
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	tdi		tdi	
							Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0
		Rp	496.999.000										
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0	0	0
							1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak				
							2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada				
							3. Leaflet	ada/tidak	ada				
							4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak				
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak									
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perhubungan

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD			
								9	10	11	12
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Perhubungan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kominfo)	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	16,66666667	0	0
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
						SOP #4					
						SOP #5					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	4	100,00
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
						4. Jabatan Fungsional #4					
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menvelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	40	0,86	7	0,15
						Jumlah PNS Kabupaten	orang	4646		4646	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	17	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Perhubungan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kominfo)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	3	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		3	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	83,33	2	66,67
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		3	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	1	100,00
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		1	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.037.212.427	0,89	57.130.000	0,01
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	306.375.000	7,74	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	3.958.313.961		57.125.000	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	78.052.000	12,71	0	0,00
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	614.112.588		57.125.000	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	78052000	1,97	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	3958313961		57125000	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada	
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		ada	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Perhubungan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kominfo)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00		tdi
		Total Asset yang dikuasai SKPD				Rp	11.553.645.582				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		tdi

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33333333	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1		-		
						2. Jabatan Fungsional #2		-		
						3. Jabatan Fungsional #3		-		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	29	0,62	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	8	47,06	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	11	64,71	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	57,14	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	15.176.111.578	3,35	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	2.497.906.560	16,67	
						Total Belanja SKPD	Rp	14.981.555.820		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	91.908.500	1,77	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.190.131.412		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	91.908.500	0,61	
						Total Belanja SKPD	Rp	14981555820		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 496.999.000	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	15	88,24	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	31	0,67	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	12	80,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	15	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.714.640.103	0,60	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	59.956.800	2,29	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	49.140.000	7,65	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	642.310.216		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	49.140.000	1,87	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	Ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 4.762.339.200	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☒

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD			
								9	10	11	12
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan 1 (PP & PA)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (KB & KS)	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	2	66,6666667	1	25
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
						SOP #4					
						SOP #5					
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	11	100,00	3	100,00
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	1	ada
						1. Jabatan Fungsional #1				PLKB	
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
						4. Jabatan Fungsional #4					
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menvelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	28	0,60	13	0,28
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	17	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (PP & PA)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (KB & KS)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	10	90,91	4	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	11		4	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	7	77,78	2	66,67
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	9		3	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00	2	100,00
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6		2	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.206.332.724	0,71	695.067.000	0,15
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	3.550.000	0,11	665.990.000	98,43
						Total Belanja SKPD	Rp	3.147.547.960		676.607.000	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	10.150.000	1,57	0	0,00
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	645.894.378		3.917.000	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	10.150.000	0,32	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	3.147.547.960		676.607.000	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada	
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		ada	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (PP & PA)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (KB & KS)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00		tdi
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	11.553.645.582				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	0	0
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak <b>surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		tdi

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

1. Urusan Sosial
2. Urusan Ketenagakerjaan
3. Urusan Transmigrasi

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 1 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Ketenagakerjaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Transmigrasi)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	2	40	1	33,33333333	0	0
					Jumlah program nasional (RKP)	program	5		3		1		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0
				SOP #1									
				SOP #2									
				SOP #3									
	SOP #4												
	SOP #5												
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda							
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	100,00	4	100,00	4	100,00
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		4		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak
					1. Jabatan Fungsional #1								
				2. Jabatan Fungsional #2									
				3. Jabatan Fungsional #3									
		4. Jabatan Fungsional #4											

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD								
								Urusan 1 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Ketenagakerjaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Transmigrasi)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	28	0,60	11	0,24	12	0,26			
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	13	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		4		4				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		4		4				
			5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
									-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
-RKA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD			Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	8	88,89	3	75,00	3	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	9		4		3				
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD			Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	85,71	3	100,00	2	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		3		2				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	1	100,00	0	tdi			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		1		0				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran			13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Rp	4.492.113.734	0,99	81.493.920	0,02	0	0,00		
							Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	tdi			
						Total Belanja SKPD	Rp	4.378.349.856		81.493.920		0				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD						
								Urusan 1 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Ketenagakerjaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Transmigrasi)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	11.857.500	21,72	0	tdi	0	tdi		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	54.591.000		0		0		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	11.857.500	0,27	0	0,00	0	tdi	
							Total Belanja SKPD	Rp	4.378.349.856		81.493.920		0	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3	
							- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
							- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
- CAlk	ada/tidak						ada		ada		ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	tdi		tdi		
						Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	tdi
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp											
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0	0	0	
							1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada					
							2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak					
							3. Leaflet	ada/tidak	tidak					
							4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak					
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak										
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

1. Urusan Industri
2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Urusan Perdagangan
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (*Bersambung ke halaman 279* )

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD					
								9	10	11	12	13	14
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Industri)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Koperasi/UKM)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Perdagangan)	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50	1	20	2	50
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0
						SOP #1							
						SOP #2							
						SOP #3							
						SOP #4							
						SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	12	100,00	4	100,00	5	83,33
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	12		4		6	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak
						1. Jabatan Fungsional #1							
						2. Jabatan Fungsional #2							
						3. Jabatan Fungsional #3							
						4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	28	0,60	7	0,15	15	0,32
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 1 (Industri)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Koperasi/UKM)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Perdagangan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang		tdi		tdi		tdi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		tdi		tdi		tdi
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	0		0		0	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	0	0	0	0	0	0
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	3	100,00	6	85,71
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00	3	100,00	4	80,00
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	1	100,00	3	100,00
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		1		3	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.844.924.293	1,07	35.080.000	0,01	264.891.088	0,06
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077	
						Belanja Modal SKPD	Rp	53.048.850	1,11	0	0,00	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	4.767.927.462		35.066.000		253.338.155	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	36.250.000	1,76	0	0,00	0	0,00
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.062.400.081		32.416.000		52.318.355	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan S	Rp	36.250.000,00	0,76	0	0,00	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	4.767.927.462,00		35066000		253338155	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 1 (Industri)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Koperasi/UKM)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Perdagangan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		ada		ada	
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak		tdi		tdi		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	582.862.000,00	3,92		tdi		tdi
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	14.861.079.600					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	1	1	1	1
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		ada		ada	
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		tidak		tidak	
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		tidak		tidak	
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		tidak		tidak	
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		tidak		tidak	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

**4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Sambungan dari halaman 276 )**

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		
		Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1		0		
						2. Jabatan Fungsional #2		0		
						3. Jabatan Fungsional #3		0		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	5	0,11	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	50,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Urusan 4 (ESDM)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPJ	10	Jumlah Program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPJ yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPJ yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	0	tdi	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	0		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	0	tdi	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	0		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	0	0,00	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	0		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	tdi	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	0		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	tdi	
						Total Belanja SKPD	Rp	-		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	0	0	

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Urusan 4 (ESDM)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	tidak			
				- LRA		- LRA	ada/tidak	tidak			
				- CALK		- CALK	ada/tidak	tidak			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	tidak	tidak		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 0	tdi		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1		
					1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
					2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
					3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
					4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
					5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

1. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2. Urusan Kebudayaan
3. Urusan Pariwisata

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD							
								Urusan 1 (Pemuda &OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pariwisata)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	1	25	1	33,33333333		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		4		3				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0		
					SOP #1										
					SOP #2										
					SOP #3										
		SOP #4													
		SOP #5													
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda									
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	100,00	4	100,00	4	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		4		4			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	0	tidak
						1. Jabatan Fungsional #1									
						2. Jabatan Fungsional #2									
						3. Jabatan Fungsional #3									
4. Jabatan Fungsional #4															

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD								
								Urusan 1 (Pemuda & OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pariwisata)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	20	0,43	9	0,19	11	0,24			
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	13	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		4		4				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		4		4				
			5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
									-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
-RKA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD			Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	8	88,89	3	75,00	3	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	9		4		3				
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD			Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	85,71	3	100,00	2	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		3		2				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	1	100,00	1	100,00			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		1		1				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran			13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.597.871.411	1,01	247.000.000	0,05	13.000.000	0,00	
								Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
						Total Belanja SKPD	Rp	4.356.084.720		246.168.774		12.904.000				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD						
								Urusan 1 (Pemuda & OR)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pariwisata)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.100.000	0,30	0	0,00	0	0,00	
							Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	691.189.869		8.200.000		9.904.000	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan S	Rp	2.100.000	0,05	0	0,00	0	0,00	
							Total Belanja SKPD	Rp	4.356.084.720		246.168.774		12.904.000	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3	
							- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
							- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
- CALk	ada/tidak						ada		ada		ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	tdi		tdi		
							Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp			0								
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0	0		
							1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada					
							2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak					
							3. Leaflet	ada/tidak	tidak					
							4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak					
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak										
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	34	0,73	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	16	94,12	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	16	94,12	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	62,50	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	8		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.903.064.827	0,64	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	21.032.500	0,80	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.999.770	1,20	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	499.192.399		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	49.140.000	1,87	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	Ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 4.762.339.200	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA  
 NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH (SATPOL PP DAN WH)  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	27	0,58	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Diklatpim	orang	5	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	62,50	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	8		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	6.153.574.905	1,36	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	6.160.000	0,23	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	53.293.668	16,29	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	327.239.408		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	49.140.000	1,87	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.622.576.758		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	Ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	Ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	Ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 4.762.339.200	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: □

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
3. Urusan Pertanahan
4. Urusan Sosial (.....*Bersambung ke halaman 294*)
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (.....*Bersambung ke halaman .....*)
6. Urusan Komunikasi dan Informatika (.....*Bersambung ke halaman .....*)
7. Urusan Pendidikan (.....*Bersambung ke halaman .....*)
8. Urusan Kebudayaan (.....*Bersambung ke halaman.....*)
9. Urusan Penanaman Modal (.....*Bersambung ke halaman.....*)

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD							
								Urusan 1 (Otda, dst.)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Renbang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pertanahan)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50	1	20	2	50		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		5		4			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0	0	
						SOP #1									
						SOP #2									
						SOP #3									
			SOP #4												
			SOP #5												
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda								
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	15	100,00	5	100,00	2	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	15		5		2			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	0	tidak
									1. Jabatan Fungsional #1						
									2. Jabatan Fungsional #2						

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 1 (Otda, dst.)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Renbang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pertanahan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						3. Jabatan Fungsional #3							
						4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	158	3,40	17	0,37	5	0,11
						Jumlah PNS Kabupaten	orang	4646		4646		4646	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	40	100,00	4	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	40		4		4	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	40	100,00	4	100,00	4	100,00			
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	40		4		4				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
						-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	15	100,00	1	100,00	3	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	15		1		3	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	11	100,00	1	100,00	2	100,00
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	11		1		2	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	11	100,00	1	100,00	1	100,00
Jumlah program dalam DPA SKPD	program					11		1		1			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	27.896.115.599	6,15	409.851.949	0,09	516.487.000	0,11
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	1.549.373.000	5,79	0	0,00	319.306.500	72,18

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD									
								Urusan 1 (Otda, dst.)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Renbang)	Capaian Kinerja	Urusan 3 (Pertanahan)	Capaian Kinerja				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				(realisasi)		Total Belanja SKPD	Rp	26.752.405.519		283.154.600		442.360.820					
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	428.289.806	4,94	0	0,00	0	0,00					
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	8.671.800.814		111.277.600		55.689.320					
						Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan	Rp	428.289.806	1,60	0	0,00	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	26.752.405.519		283.154.600		442360820					
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3				
								- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
								- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
- CALK								- CALK	ada/tidak	ada		ada		ada			
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	tdi		tdi					
								Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	1.523.215.825	11,78		tdi
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	12.928.356.482													
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0	0	0				
								1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada					
								2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak					
								3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak					
								4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak					
								5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak				

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

4. Urusan Sosial (.....*Bersambung ke halaman 291* )5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (.....*Bersambung ke halaman .....* )6. Urusan Komunikasi dan Informatika (.....*Bersambung ke halaman .....* )

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD						
								9	10	11	12	13	14	
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan 4 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 5 (PMD)	Capaian Kinerja	Urusan 6 (Kominfo)	Capaian Kinerja		
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	20	0	0	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	5		3		1		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0	0
						SOP #1								
						SOP #2								
						SOP #3								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda							
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	2	100,00	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		2		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1								
		2. Jabatan Fungsional #2												
		3. Jabatan Fungsional #3												
4. Jabatan Fungsional #4														

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD								
								Urusan 4 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 5 (PMD)	Capaian Kinerja	Urusan 6 (Kominfo)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	11	0,24	4	0,09	7	0,15			
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan	orang	4	100,00	2	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		2		4				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	2	100,00	4	100,00	4	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		2		4				
			5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3
									-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada	
-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
-RKA-SKPD	ada/tidak	ada								ada		ada				
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD			Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	3	75,00	3	100,00			
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	2		4		3				
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD			Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	3	100,00	2	100,00			
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		3		2				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD			Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	2	100,00	1	100,00			
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		2		1				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	74.902.500	0,02	1.007.757.000	0,22	759.131.500	0,17			
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077				
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
						Total Belanja SKPD	Rp	64.005.000		991.619.000		753.821.800				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD						
								Urusan 4 (Sosial)	Capaian Kinerja	Urusan 5 (PMD)	Capaian Kinerja	Urusan 6 (Kominfo)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	54.591.000		234.340.000		540.321.800		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan S	Rp	-	0,00	0	0,00	0	0,00	
							Total Belanja SKPD	Rp	64.005.000		991.619.000		753821800	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3	
							- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
							- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
- CAlk	ada/tidak	ada		ada		ada		ada						
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	tdi		tdi		
						Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	tdi
		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp											
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0	0	0	
							1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada					
							2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak					
							3. Leaflet	ada/tidak	tidak					
							4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak					
		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak										
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ☐

7. Urusan Pendidikan (..... Sambungan dari halaman .....)

8. Urusan Kebudayaan (..... Sambungan dari halaman.....)

9. Urusan Penanaman Modal (.....Sambungan dari halaman.....)

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD						
								Urusan 7 (Pendidikan)	Capaian Kinerja	Urusan 8 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 9 (Penanaman Modal)	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	1	20	2	50	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	5		5		4		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0	0	0	0
						SOP #1								
						SOP #2								
						SOP #3								
			SOP #4											
			SOP #5											
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda							
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	2	100,00	2	100,00	4	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	2		2		4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1								
						2. Jabatan Fungsional #2								
						3. Jabatan Fungsional #3								
			4. Jabatan Fungsional #4											
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	5	0,11	4	0,09	11	0,24	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646		4646		

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD							
								Urusan 7 (Pendidikan)	Capaian Kinerja	Urusan 8 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 9 (Penanaman Modal)	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	2	100,00	2	100,00	4	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2		2		4			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangatan	orang	2	100,00	2	100,00	4	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2		2		4			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3	3	3		
						-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada			
						-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada			
						-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada		ada			
				Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	3	75,00	3	100,00
							Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		4		3		
				Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	66,67	2	66,67	2	100,00
							Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		3		2		
				Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	2	100,00	1	100,00
							Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		2		1		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	150.000.000	0,03	235.000.000	0,05	79.192.000	0,02		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077		453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	11.500.000	7,75	0	0,00	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	148.458.310		234.282.574		79.192.000			
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	31.058.310		107.082.574		41.792.000			
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan	Rp	-	0,00	0	0,00	0	0,00			

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD					
								Urusan 7 (Pendidikan)	Capaian Kinerja	Urusan 8 (Kebudayaan)	Capaian Kinerja	Urusan 9 (Penanaman Modal)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				realisasi)	100%	Total Belanja SKPD	Rp	148.458.310		234.282.574		79.192.000	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada		ada	
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		ada		ada	
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi		tdi		tdi
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	0	0	0	0
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada					
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak					
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak					
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak					
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

**KOTA** : LANGSA  
**NAMA SKPD** : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN** : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0		
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
						Jumlah SOP	buah	0	0		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP		SOP #1				
							SOP #2				
							SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	18	100,00		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	18			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
4. Jabatan Fungsional #4											
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	47	1,01		
						Jumlah PNS Kota	orang	4646			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan pelatihan	orang	17	94,44		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	18			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	18	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	18		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	8.654.759.618	1,91	
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	571.492.000	6,60	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.654.759.618		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	301.540.625	7,68	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.925.914.678		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	301.540.625	3,48	
						Total Belanja SKPD	Rp	8.654.759.618		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	100%	1	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	tidak		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	tidak		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	tidak		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	148.625.000 229.153.200	64,86	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

**KOTA** : LANGSA  
**NAMA SKPD** : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPKA)  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN** : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	3	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	1	1	
						SOP #1		1		
						SOP #2				
				SOP #3						
				SOP #4						
				SOP #5						
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan	Perda	4	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	4		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	21	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	21		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1		0		
						2. Jabatan Fungsional #2		0		
						3. Jabatan Fungsional #3		0		
			4. Jabatan Fungsional #4		0					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	98	2,11	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	9	42,86	
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21								

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangtatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangtatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangtatan	orang	8	38,10	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	15.544.923.079	3,43	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	318.950.000	2,19	
						Total Belanja SKPD	Rp	14.551.042.786		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	91.779.900	3,05	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.010.197.664		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	91.779.900,00	0,63	
						Total Belanja SKPD	Rp	14.551.042.786,38		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								Elemen Data	Capaian Kinerja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada			
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada			
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 29.685.950.270	0,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1		
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada				
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak				
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak				
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak				
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : INSPEKTORAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33333333	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9		
		Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2		1		
						3. Jabatan Fungsional #3		13		
			4. Jabatan Fungsional #4		3					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	48	1,03	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	6	66,67	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9			

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	9	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	4.521.509.204	1,00	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	8.950.000	0,20	
						Total Belanja SKPD	Rp	4.480.171.375		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	30.067.500	2,43	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.235.424.715		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	30067500	0,67	
						Total Belanja SKPD	Rp	4480171375		

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	0		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		tdi	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS SYARIAT ISLAM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD		11
								9	10	
ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Elemen Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN/ CATATAN	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	21	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	21			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	34	0,73	
					Jumlah PNS Kota	orang	4646			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	11	52,38	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21			

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	18	85,71	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	5		
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100,00		
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5			
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00		
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	5.138.961.397	1,13	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	158.500.000	3,08	
						Total Belanja SKPD	Rp	5.138.961.397		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	18.580.000	10,28	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	180.780.000		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	18.580.000	0,36	
						Total Belanja SKPD	Rp	5.138.961.397		
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
		- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada				
		- LRA		- LRA	ada/tidak	ada				
		- CALK		- CALK	ada/tidak	ada				

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	tdi	
					Total Asset yang dikuasai SKPD		Rp	0		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT KIP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								9	10	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	24	0,52	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	5	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5		

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangkatan	orang	5	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	13	100,00	
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD					program	13			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	13	100,00	
		Jumlah Program dalam RKA SKPD					program	13			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	13	100,00	
		Jumlah program dalam DPA SKPD					program	13			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	992.156.059	0,22		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	944.031.982			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.650.000	7,88		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	262.001.785			
						16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	20.650.000
		Total Belanja SKPD	Rp	5.138.961.397							
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
- Neraca						- Neraca	ada/tidak	ada			
- LRA						- LRA	ada/tidak	ada			
- CALK						- CALK	ada/tidak	ada			

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	2.190.000	0,15	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.460.439.172			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak <b>surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA KOTA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2013)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN	
								9	10		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program		tdi		
						Jumlah program nasional (RKP)	program				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah		0		
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
			SOP #4								
			SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan		tdi		
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan				
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan		tidak		
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
			3. Jabatan Fungsional #3								
			4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang		tdi		
						Jumlah PNS Kota	orang				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang		tdi		
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang					

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangkatan	orang		tdi		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen		0		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak				
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak				
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program		tdi		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program		tdi		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program		tdi		
	Jumlah program dalam DPA SKPD					program					
	6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp		tdi	
							Total belanja APBD (anggaran)	Rp			
Besaran belanja modal			14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp		tdi		
						Total Belanja SKPD	Rp				
Besaran belanja pemeliharaan			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp				
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp		tdi		
						Total Belanja SKPD	Rp				
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen		0				
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak				
				- LRA		- LRA	ada/tidak				
				- CALK		- CALK	ada/tidak				

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD	ada/tidak		tdi	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp		tdi	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp				
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah		0	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak			
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak			
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak			
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak			
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		tdi	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA LAMA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	37	0,80	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan persyaratan Diklatpim	orang	10	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD					program	5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		Jumlah Program dalam RKA SKPD					program	4			
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00			
Jumlah program dalam DPA SKPD					program	3					
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.941.176.228	0,65		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	7.439.630	0,26		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.910.856.707			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.000.000	3,45		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	202.633.480			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.000.000	0,24		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.910.856.707			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
- Neraca					ada/tidak	ada					
- LRA					ada/tidak	ada					

				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	65.423.000	4,94	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.325.525.000		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BARAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
					SOP #1					
					SOP #2					
					SOP #3					
		SOP #4								
		SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
					1. Jabatan Fungsional #1					
					2. Jabatan Fungsional #2					
					3. Jabatan Fungsional #3					
		4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	34	0,73	
					Jumlah PNS Kota	orang	4646			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan persyaratan Diklatpim	orang	10	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10			

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	8	80,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD					program	5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		Jumlah Program dalam RKA SKPD					program	4			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
		Jumlah program dalam DPA SKPD					program	3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.891.684.876	0,64		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.761.936.613			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	8.500.000	5,11		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	166.435.953			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	8.500.000	0,31		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.761.936.613			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
- Neraca					ada/tidak	ada					
- LRA					ada/tidak	ada					

				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	55.324.000	4,07	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.360.829.000		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	32	0,69	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	7	70,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD					program	5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		Jumlah Program dalam RKA SKPD					program	4			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
		Jumlah program dalam DPA SKPD					program	3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.033.799.203	0,67		
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.968.291.410			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.000.000	2,63		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	190.381.552			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.000.000	0,17		
						Total Belanja SKPD	Rp	2.968.291.410			
			Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
							- Neraca	ada/tidak	ada		
	- LRA	ada/tidak					ada				

				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	65.851.000	3,69	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.784.235.000		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BARO

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
					SOP #1					
					SOP #2					
					SOP #3					
		SOP #4								
		SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	10	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
		4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	19	0,41	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	orang	10	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		program						5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		program						4			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
		program						3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.841.038.463	0,63		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00		
						Total Belanja SKPD	Rp	1.662.975.719			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	37.150.000	51,49		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	72.150.000			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	37.150.000	2,23		
						Total Belanja SKPD	Rp	1.662.975.719			
			Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
							- Neraca	ada/tidak	ada		
	- LRA	ada/tidak					ada				

				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	70.325.000	5,81	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.209.525.000		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	2	3	4	5	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN		
								9	10			
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33333333			
								Jumlah program nasional (RKP)	3			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)		Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0		
									SOP #1			
									SOP #2			
									SOP #3			
SOP #4												
SOP #5												
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi			
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	83,33			
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	6				
		Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD		Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak		
									1. Jabatan Fungsional #1			
									2. Jabatan Fungsional #2			
									3. Jabatan Fungsional #3			
4. Jabatan Fungsional #4												
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	19	0,41			
						Jumlah PNS Kota	orang	4646				
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	3	60,00			
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5										

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan	orang	5	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		program						5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
program	4										
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00			
program						3					
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.500.067.004	0,33		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	125.450.000	8,72		
						Total Belanja SKPD	Rp	1.439.200.830			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	4.500.000	1,52		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	295.485.800			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	4.500.000	0,31		
						Total Belanja SKPD	Rp	1.439.200.830			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3			
- Neraca					ada/tidak	ada					
- LRA					ada/tidak	ada					
- CALK					ada/tidak	ada					

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD <i>5 tahun terakhir</i>	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	tdi	
		Total Asset yang dikuasai SKPD				Rp	0			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1.683.005.000		
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
			SOP #4							
			SOP #5							
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	tdi	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
			4. Jabatan Fungsional #4							
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	46	0,99	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Diklatpim	orang	17	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00		
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
			Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100,00	
		program						5			
			Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		program						4			
			Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
		program						5			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	9.806.996.638	2,16		
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	164.580.000	1,73		
						Total Belanja SKPD	Rp	9.526.499.687			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	25.000.000	1,54		
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.623.253.463			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	25.000.000	0,26		
						Total Belanja SKPD	Rp	9.526.499.687			
			Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
		- Neraca					ada/tidak	ada			
- LRA	ada/tidak	ada									

				- CALk		- CALk	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD <i>5 tahun terakhir</i>	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	0		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD		KETERANGAN/ CATATAN
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	33,33333333	
						Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
						SOP #1				
						SOP #2				
						SOP #3				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100,00	
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
						1. Jabatan Fungsional #1				
						2. Jabatan Fungsional #2				
						3. Jabatan Fungsional #3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	27	0,58	
						Jumlah PNS Kota	orang	4646		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	8	47,06	
				Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17				

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangtatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangtatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangtatan	orang	17	100,00	
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	10	100,00	
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	10		
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00	
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100,00	
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	2.146.112.209	0,47	
						Total belanja APBD (anggaran)	Rp	453.385.670.077		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	1.780.000	0,08	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.111.531.673		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.320.000	0,08	
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.623.253.463		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.320.000	0,06	
						Total Belanja SKPD	Rp	2.111.531.673		
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada <b>laporan inventarisasi</b> barang/asset SKPD	ada/tidak	ada	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	387.518.867		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
				1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
				2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
				3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
				4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
				5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>ada/tidak surat ketetapan</b> hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perpustakaan

2. Urusan Kearsipan

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD						
								Urusan 1 (Perpustakaan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kearsipan)	Capaian Kinerja			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	50	0	0			
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		1					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0			
						SOP #1								
						SOP #2								
						SOP #3								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi			
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda								
			3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	2	100,00
								Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		2		
						5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak
						1. Jabatan Fungsional #1								
			2. Jabatan Fungsional #2											
			3. Jabatan Fungsional #3											
			4. Jabatan Fungsional #4											
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS SKPD	orang	12	0,26	6	0,13			
					Jumlah PNS Kota	orang	4646		4646					
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	100,00	2	100,00			
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		2				

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Perpustakaan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kearsipan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	2	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		2	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	0	0
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada			
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada			
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100,00	2	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4		2	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	75,00	2	100,00
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		2	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	0	tdi
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		0	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.137.686.311	0,25	0	0,00
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	0	tdi
						Total Belanja SKPD	Rp	1.112.727.376		0	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	9.110.000	5,80	0	tdi
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	156.963.429		0	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	9110000	0,82	0	tdi
						Total Belanja SKPD	Rp	1112727376		0	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	0	0
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada			
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada			

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Perpustakaan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kearsipan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	tidak	tidak	tdi	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	tdi	tdi	
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	0			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0
					1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
					2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
					3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
					4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
					5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tdi	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Kelautan Perikanan

2. Urusan Pertanian

3. Urusan Ketahanan Pangan (.....Bersambung ke Halaman.....)

4. Urusan Kehutanan (..... Bersambung ke Halaman .....

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD			
								9	10	11	12
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan 1 (Kelautan Perikanan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pertanian)	Capaian Kinerja	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	0	0
						Jumlah program nasional (RKP)	program	2		2	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0
						SOP #1					
						SOP #2					
						SOP #3					
			SOP #4								
			SOP #5								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	5	100,00	4	100,00
						Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5		4	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	0	tidak
						1. Jabatan Fungsional #1					
						2. Jabatan Fungsional #2					
						3. Jabatan Fungsional #3					
			4. Jabatan Fungsional #4								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	35	0,75	18	0,39
						Jumlah PNS Kabupaten	orang	4646		4646	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	5	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5		4	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Kelautan Perikanan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pertanian)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5		4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	3	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	6		3	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	83,33	2	66,67
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		3	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	1	100,00
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		1	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	7.243.780.637	1,60	788.297.400	0,17
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	1.810.733.000	25,24	244.700.000	31,28
						Total Belanja SKPD	Rp	7.173.217.341		782.314.800	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	8.940.080	0,93	0	0,00
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	965.454.596		537.614.800	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	8.940.080	0,12	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	7.173.217.341		782.314.800	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada	
				- CALK		- CALK	ada/tidak	ada		ada	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan 1 (Kelautan Perikanan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Pertanian)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / aset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00		tdi
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	11.553.645.582			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0
							1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
							2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
							3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
							4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
			5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	tdi	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012**

KOTA : LANGSA

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

3. Urusan Ketahanan Pangan (.....sambungan dari Halaman.....)

4. Urusan Kehutanan (..... Sambungan dari Halaman .....)

1	2	3	4	5	6	7	8	LPPD									
								9	10	11	12						
ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	Urusan (Ketahanan Pangan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kehutanan)	Capaian Kinerja							
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	0	0	0						
						Jumlah program nasional (RKP)	program	1		3							
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	0	0						
						SOP #1											
						SOP #2											
						SOP #3											
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		tdi		tdi						
						Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda										
						3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	4	100,00	4	100,00
												Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	4		4	
												5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0
1. Jabatan Fungsional #1																	
2. Jabatan Fungsional #2																	
3. Jabatan Fungsional #3																	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang	20	0,43	22	0,47						
						Jumlah PNS Kabupaten	orang	4646		4646							
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	4	100,00	4	100,00						
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		4							

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan (Ketahanan Pangan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kehutanan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	4	100,00	4	100,00
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	4		4	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	3	3
				-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
				-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		ada	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	3	100,00
						Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3		3	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	66,67	2	66,67
						Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		3	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100,00	2	100,00
						Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		2	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	193.062.000	0,04	1.288.188.000	0,28
						Total belanja APBD ( anggaran)	Rp	453.385.670.077		453.385.670.077	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0	0,00	282.371.982	23,79
						Total Belanja SKPD	Rp	175.750.000		1.186.705.982	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0	0,00	0	0,00
						Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	7.000.000		904.334.000	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00	0	0,00
						Total Belanja SKPD	Rp	175.750.000		1.186.705.982	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	3	3
				- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ada		ada	
				- LRA		- LRA	ada/tidak	ada		ada	
				- Calk		- Calk	ada/tidak	ada		ada	

1	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Satuan elemen data	LPPD			
								Urusan (Ketahanan Pangan)	Capaian Kinerja	Urusan 2 (Kehutanan)	Capaian Kinerja
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada		tdi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	tdi		tdi
						Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	0			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	0	0
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada				
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak				
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak				
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak				
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak		tdi

## QANUN KOTA LANGSA TAHUN 2011

<b>NO.</b>	<b>NOMOR QANUN</b>	<b>TANGGAL QANUN</b>	<b>T E N T A N G</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	1	013/04/2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011	
2	2	05/12/2011	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010	
3	4	06/12/2011	Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011	
4	5	23/12/2011	Retribusi Jasa Umum	
5	6	23/12/2011	Retribusi Jasa Usaha	
6	7	23/12/2011	Retribusi Perijinan Tertentu	
7	8	23/12/2011	Pajak Daerah	
8	9	23/12/2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2011 - 2031	
9	10	30/12/2011	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012	